

**GERAKAN SEPARATIS PATTANI SEBAGAI FAKTOR KONFLIK DAN
PENGARUHNYA TERHADAP ASPEK KEAMANAN DI THAILAND**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Ilmu
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universitas Hasanuddin*

**MEGAWATI
E13104705-1**

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	24-07-08
Asal Dik	subpul
Banyak	1 eksemplar
Harga	Angket
No. Invent.	158
No. Klas	.

**PROGRAM REGULER SORE
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2008**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : GERAKAN SEPARATIS PATTANI SEBAGAI FAKTOR KONFLIK
DAN PENGARUHNYA TERHADAP ASPEK KEAMANAN DI
THAILAND

NAMA : MEGAWATI

NIM : E131 04 705-1

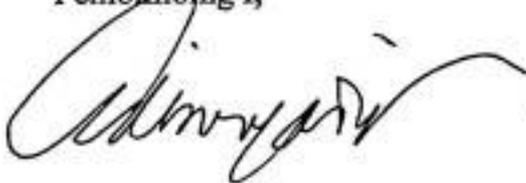
JURUSAN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, Juni 2008

Mengetahui,

Pembimbing I,



Dr. Adi Suryadi Culla, M.Si
NIP. 131 992 468

Pembimbing II,



Seniwati, S.Sos., M.Hum
NIP. 131 288 621

Mengesahkan,

Ketua Program S1
Reguler Sore



Drs. H. Nurdin Nara, M.Si
NIP. 131 866 084

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Judul Skripsi : GERAKAN SEPARATIS PATTANI SEBAGAI
FAKTOR KONFLIK DAN PENGARUHNYA
TERHADAP ASPEK KEAMANAN DI THAILAND

Nama : MEGAWATI

NIM : E 131 04 705-1

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

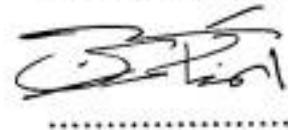
Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jumat 27 Juni 2008.

TIM EVALUASI

Ketua : Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag



Sekretaris : Agussalim, S.Ip, MIRAP



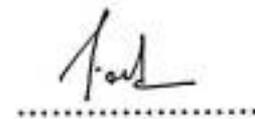
Anggota : 1. Drs. Sabri Dahlan

.....

2. Drs. Aspiannor Masrie



3. Seniwati, S.Sos, M. Hum



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta keimanan dan ilmu yang dalam kepada kita semua. Shalawat dan salam kami haturkan kepada rasulullah Muhammad SAW, yang telah memperkenalkan jalan Islam yang dirahmati olehNya untuk seluruh alam.

Tulisan ini adalah buah tangan dari penulis yang disiapkan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Namun penulis menyadari bahwa segala upaya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karena itu, diharapkan saran dan masukan demi menyempurnakan penulisan ini yang kiranya kelak dapat digunakan sebaik- baiknya.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta dan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua orang tuaku yang tercinta yang senantiasa mendidik dan mendoakan Ananda dalam aktifitas keseharian hingga dapat menyelesaikan studi sekarang ini. Saudaraku dan keluarga, terima kasih banyak atas pengertiannya.

Rasa terima kasih yang besar dan penghargaan penulis haturkan kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dekan FISIP UNHAS beserta staff dan karyawan.
3. Bapak Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS, **Drs. Patrice Lumumba, M.A.**, atas segala masukan dan dorongan kepada penulis.
4. Bapak Sekertaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS, **Drs. Aspianoor Masrie**, atas segala masukan dan dorongan kepada penulis.

5. Bapak Ketua Program Reguler Sore Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, **Drs. H. Nurdin Nara, M.Si.**, beserta segenap karyawan administrative yang banyak membantu penulis sejak terdaftar sebagai mahasiswa.
6. Konsultan I, **Dr Adi Suryadi Culla, M.Si**, Konsultan II, **Seniwati, S.Sos, M.Hum.**, yang telah meluangkan waktunya, serta segala ketulusan dan pengarahannya yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu staff Edukatif pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Yang telah banyak memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan sejak penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. J. Salusu, M.A.**, **Prof. Dr. A.R. Paembonan, M.S.**, **Drs. Patrice Lumumba, M.A.**, **Drs Muliadi Sukardi, M.Si**, **Drs Aspianoor Masrie**, **Drs. Sabri Dahlan**, **Dra. Sri Honora, M.A.**, **Drs. M. Imran Hanafi, M.A.,M.Ec.**, **Dra. St Nurcahaya Tandang Sm.Hk, M.Si.**, **M.Nasir Badu, S.Ip, M.A.**, **Seniwati, S.Sos, M.Hum**, **Drs. Husain Abdullah**, **Drs. Munjin Syafik**, **Ishak Rahman, S.Ip.**, dan **Agus Salim B.,S.Ip.**
8. Teman- teman ku khususnya **Wisda** (Say jangan ko lupa kan perjuangan ta sampai bs ujian meja nah...& Kejar truuus cinta sejati mu sampai ke Timika. Aq slalu mendoakanmu..., **Ef** (Qm emang tmnku yg paliiiiing cakep n baik... tapi suka menagih2 utang... jangan lah bgitu Eeef) **Odha** (beib... sy salut sm prjuanganmu melawan orng2 yg sirik sm qmu, Pertahankan i2 say) **Olive** (Tetap semangat yaaa...cari kerja & kapan meriiid nya? Udah tua atuuuh...**Ikha** (haloo say, qmu tuh tenang n sabar banget dlm menghadapi masalah, aq suka i2) **Tami, Nova** (kalian ingat ngak, waktu qt slalu bersama...I miss u all, **Mas**

Roni (tambah alim aja) **Ipul** (kapan jalan2nya lg?) **Adri** (bagus skali mi... Skripsi mu) **Janris** (ke mana aja kok nga pernah muncul, kangen niih dengar nasehat2 mu), **Muqni** (ku suka mu klo pkai kemeja ko...), **Ayu, Ita, uni, Chichi dan lain- lain** atas segala kebaikan hati yang telah dicurahkan dalam wujud perhatian dukungan dan bantuan.

9. Karya sederhana ini *kupersembahkan* kepada **seseorang** yang selalu membuatku tersenyum, membuat hidupku lebih bermakna, membuat hari-hari ku menjadi Hari terburuk dan merasakan hal terindah yang tak dapat dilihat dan disentuh, tapi dapat dirasakan dengan hati yang ikhlas

ABSTRAKSI

Megawati., E 131 04 705 - 1, Gerakan Separatis Pattani Sebagai Faktor Konflik Dan Pengaruhnya Terhadap Aspek Keamanan Di Thailand, di bawah bimbingan Dr. Adi Suryadi Culla, M. Si., selaku konsultan I dan Seniwati, S.Sos., M. Hum. selaku konsultan II, pada Jurusan Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini menggambarkan tentang konflik antara Pemerintah Thailand dengan Gerakan Separatis Pattani yang telah berlangsung selama beberapa kurun waktu. Fokus penelitian adalah mengetahui pengaruh gerakan separatis Pattani terhadap aspek keamanan di Thailand dan mengetahui kebijakan pemerintah Thailand dalam menciptakan keamanan di kawasan tersebut. Berpijak dari upaya-upaya penyelesaian konflik di kawasan Thailand Selatan, namun seringkali mengalami kegagalan sehingga keamanan masih belum dapat diwujudkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini didasarkan pada tipe penelitian preskriptif yang merupakan gabungan eksplanatif dan prediktif. Analisis eksplanatif merupakan penggambaran tentang persoalan pemerintah Thailand dengan gerakan separatis Pattani. Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah telaah pustaka dengan menggunakan jenis data sekunder yang berasal dari berbagai literatur sebagai penunjang dalam penyusunan skripsi ini. Dalam penelitian ini, digunakan pula analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta dan data yang di peroleh.

Kehadiran gerakan separatis Pattani di Thailand Selatan telah menyebabkan konflik yang berkepanjangan dengan aparat militer di Thailand. Masyarakat hidup dalam ketakutan, aktivitas sehari-hari mereka terganggu akibat adanya konflik tersebut. Aksi-aksi kekerasan seperti teror, pembunuhan, penculikan, dan peledakan bom terus-menerus mewarnai suasana di empat propinsi di Thailand Selatan termasuk propinsi Songkla telah mengakibatkan puluhan ribu korban jiwa yang tewas. Dalam mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Thailand telah melakukan berbagai kebijakan dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian di Thailand Selatan baik dari segi internal dan eksternal.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN TIM EVALUASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Gerakan Separatis	16
B. Teori Konflik	22
C. Keamanan Nasional	32
BAB III GAMBARAN UMUM GERAKAN SEPARATIS ISLAM PATTANI DI THAILAND SELATAN	
A. Sejarah Berdirinya Gerakan Pattani	37
B. Substansi Gerakan Pattani	49
1.1 Aktor Kunci dan Gerakan Separatis Pattani	49
1.2 Bentuk-Bentuk Perlawanan Gerakan Separatis Pattani	52
1.3 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pemberotakan Etnis Pattani	52

C. Konflik Antara Gerakan Separatis Pattani dengan Pemerintah Thailand	56
BAB IV	ANALISIS HASIL PEMBAHASAN
A. Pengaruh Gerakan Separatis Pattani Terhadap Aspek Keamanan Di Thailand	69
B. Kebijakan Pemerintah Thailand Dalam Upaya Menciptakan Keamanan Di Thailand	81
1. Dari Segi Internal	81
2. Dari Segi Eksternal	85
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	89
B. Saran- saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang potensial untuk pengembangan ekonomi, karena letak geografisnya yang sangat strategis dan menguntungkan dengan kekayaan alam yang berlimpah serta sumber daya manusia yang besar, tidak heran jika dunia internasional menaruh perhatian besar terhadap kawasan ini. Terlebih lagi banyak negara luar yang memiliki kepentingan tertentu. Hal itulah yang membuat kawasan ini rentan dengan berbagai konflik, baik yang berskala bilateral, multilateral maupun regional.

Negara di Asia Tenggara dengan latar belakang masyarakatnya yang majemuk, maka tidak heran jika ancaman konflik sering berasal dari dalam negerinya sendiri. kemajemukan dalam hal agama, suku, ras, bahasa maupun ideologi yang dimiliki dapat menimbulkan berbagai perbedaan mendasar yang bisa saling berbenturan dan berujung pada lahirnya kelompok gerakan separatis di kawasan tersebut. Beberapa contoh gerakan separatis yang terjadi Asia Tenggara antara lain : Bangsa Moro yang diwakili oleh MNLF (*Moro National Liberation Front*), rakyat Aceh diwakili oleh ASNLFF (*Acheh Sumatera National Liberation Front*), ROHINGYA (Myanmar) dan Patani diwakilli oleh PULO (*Pattani United Liberation Front*).¹ Sebuah organisasi yang kuat tercermin dari potensinya untuk menggalang dukungan dari dalam maupun luar negeri,

¹ Dwi haryono, Separatis Etnik di Thailand Selatan, [http:// Indronet. File wordpress. Com/2007/09/](http://Indronet.File.wordpress.Com/2007/09/) diakses tgl 12 Februari 2008

keempat gerakan perlawanan tersebut diatas berusaha menggalang dukungan domestik maupun internasional guna membantu tujuan pergerakannya.²

Negara dengan penduduk multi agama dan multietnik mendapat tantangan besar bagaimana menyatukan mereka dalam payung satu nasionalisme. Apalagi beberapa etnik atau agama telah tumbuh dalam satu kekuatan dinamis selama ratusan tahun. Sebagian gerakan separatisme muncul dari satu etnik atau agama yang mendapat kebijakan 'diskriminatif' dari pemerintah pusat. Kebijakan ini diciptakan untuk meredam menguatnya identitas lokal sehingga pemerintah pusat merasa terancam, atau sengaja dibuat untuk tujuan 'integrasi nasional'. Antara 1947 hingga 1953, beberapa negara baru di Asia Tenggara mendapat letupan kelompok yang menuntut 'otonomi khusus' atau 'pemisahan diri' dari pemerintah pusat. Dua negara yang belum berhasil 'menaklukkan' kelompok ini diantaranya Thailand Selatan dan Filipina Selatan, yang kebetulan sama-sama Muslim minoritas ditengah mayoritas Buddha di Thailand dan Kristen di Filipina.³

Thailand merupakan salah satu Negara di kawasan Asia Tenggara yang mengalami konflik dengan gerakan perlawanan separatis. Hal ini disebabkan oleh adanya sikap diskriminasi pemerintah terhadap kaum minoritas muslim di Thailand Selatan. Thailand terdiri dari 76 Propinsi yang dikelompokkan ke dalam 5 Propinsi (Utara 17 Propinsi, Timur Laut 19 Propinsi, Tengah 19 Propinsi dan Selatan 14 Propinsi). Populasi Thailand didominasi oleh etnis Thai dan Lao (75%) dan sekitar 95%

² Pengaruh Geger Thaksin Terhadap Konflik Thailand Selatan, [www. Wahidinstitute. Org/ Indonesia/ content/ view/228/52/-22](http://www.Wahidinstitute.Org/Indonesia/content/view/228/52/-22) k, diakses tgl 12 Februari 2008

³ Adi Saputra, Syahrial Syabrani, *Sebab-Sebab Konflik di Thailand Selatan*, [http://jurnal .bl.ac.id/wp content/up loads/2007/08/trans%20%20April 2007. pdf](http://jurnal.bl.ac.id/wp-content/uploads/2007/08/trans%20%20April%202007.pdf) diakses tgl 10 Februari 2008



penduduk Thailand adalah pemeluk agama Budha aliran Theravada. Empat Propinsi di wilayah Thailand Selatan tersebut mayoritas Islam.⁴

Islam masuk ke Thailand pada abad ke-10 Masehi melalui para pedagang dari Jazirah Arab. Penduduk setempat dapat menerima ajaran Islam dengan baik tanpa paksaan. Kawasan Thailand yang banyak dihuni umat muslim adalah wilayah bagian Selatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Jumlah umat Islam di Thailand relatif kecil, yakni sekitar 2%. Sumber lain menyebutkan ada sekitar 1% dari jumlah penduduk Thailand, namun demikian umat Muslim di Thailand terus bertahan dan berusaha berda'wah, meski dalam serba keterbatasan.⁵

Peta Thailand Selatan



Sumber : [wisata Thailand.com/selatan.htm](http://wisata.Thailand.com/selatan.htm). diakses tgl. 15 Februari 2008

Keterangan: 1. Pattani 3. Yala 5. Songkhla
 2. Narathiwat 4. Satun

⁴ *Thailand Tudung Al Qaeda Sponsori Gerakan Pattani*, <http://www.Theglobfund.Org/en/> diakses tgl 15 Februari 2008

⁵ *Kelompok Separatis Thailand Selatan Yang Memimpin Serangan*, www.Kompas.com diakses tgl 10 Juni 2008

Lima Propinsi di wilayah Thailand Selatan tersebut mayoritas berpenduduk muslim jika dibandingkan dengan Propinsi lain diwilayah Thailand. Lima Propinsi yang berpenduduk mayoritas muslim tersebut yaitu Pattani 80%, Narathiwat 63%, Satun 66%, Yala 78% sedangkan di Songkhla, Muslim sekitar 19%, minoritas, dan 76,6% Buddha. Umat muslim juga tersebar di beberapa wilayah lain, seperti di Propinsi Pattalung, Krabi, dan Nakorn Srithammarat. Sementara mayoritas penduduk yang berbahasa Melayu, rata-rata 70 persen berada di tiga propinsi: Pattani, Yala, dan Narathiwat, sementara penduduk berbahasa China, ada tiga provinsi: Narathiwat, 0,3 % Pattani, 1,0 %, dan Yala, 3,0 %. Sementara Songkhla yang pernah menjadi kerajaan Pattani, kulturnya telah diBuddhiskan atau disiamkan berbahasa Thai.⁶

Berikut ini Sensus Penduduk dan Rumah Tangga, Provinsi Thailand Selatan pada tahun 2000:

Provinsi	Wilayah	Total 1982	Muslim (%)	Rural (%)	Total 2000	Muslim (%)
Pattani	812	467.621	77	91	596.000	80.7
Yala	1.799	467.735	78	87	415.500	68.9
Narathiwat	1.821	291.166	63	76	662.400	82.0
Satun	1.076	179.567	66	89	247.900	67.8

Sumber: <http://www.Bangkokpost.Com/breaking news>. Php diakses tgl. 5 Mei 2008

Awalnya kelima Propinsi di Thailand Selatan itu merupakan bagian dari sebuah kerajaan Melayu Islam yang berdaulat, mempunyai kesultanan dan kelembagaan yang tersendiri yakni kerajaan Pattani. Pattani adalah sebagian dari tanah melayu. Namun pada pertengahan abad ke-19 Masehi Pattani telah menjadi korban penaklukan kerajaan Siam. Perkembangan selanjutnya, nama Pattani telah menjadi sebutan bagi seluruh

⁶ Dwi haryono, Separatis Etnik di Thailand Selatan, [http:// Indronet. File wordpress. Com/2007/09/](http://Indronet.File.wordpress.Com/2007/09/) diakses tgl 12 Februari 2008

wilayah muslim Thailand selatan, tidak lagi menjadi sebutan sebuah propinsi di Thailand. Pattani telah menjadi lambang perjuangan umat Islam.⁷

Identitas lokal di Thailand Selatan lebih dekat dengan Kelantan dan Kedah, Malaysia. Masyarakat secara tradisional lebih *at home* menggunakan bahasa Melayu dibandingkan bahasa Thai yang digalakkan oleh pemerintah pusat sebagai bahasa resmi negara. Keterpaksaan masyarakat Melayu Muslim di Thailand Selatan dirasakan selama puluhan tahun, sejak integrasi Melayu di selatan Thailand menjadi bagian dari Kerajaan Thailand. Penggunaan bahasa Thai wajib digunakan di kantor kerajaan, pemerintah, sekolah dan media. Radio, TV dan media cetak harus menggunakan bahasa Thai sebagai medium pemberitaan. Media elektronik, khususnya radio lokal hanya diperbolehkan menggunakan bahasa Melayu tidak lebih dari 20 persen keseluruhan programnya.

Strategi pemerintah Thailand memang membuahkan hasil. Dalam waktu sekitar 50 tahun, banyak generasi muda Melayu Muslim lebih suka berbahasa Thai dibandingkan bahasa Melayu, baik di sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi mereka 'dipaksa' keluarga untuk berbicara dalam bahasa Melayu ketika mereka berkumpul dilingkungan keluarga. Upaya menjaga 'tradisi nenek moyang' menjadi bagian dari identitas terkuat bagi keluarga Muslim Melayu di Thailand Selatan yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat Thai lainnya. Mereka menyadari bahwa niat memisahkan diri dari pemerintah Kerajaan Thailand hanyalah suatu mimpi lama, yang kini harus ditinggalkan. Terintegrasi dengan Thailand, bersaing dengan mayoritas masyarakat etnis Thai yang Buddis adalah pilihan saat ini.

⁷ Adi Saputra, Syahrial Syabrani, *Sebab-Sebab Konflik di Thailand Selatan*, <http://jurnal.bl.ac.id/wp-content/uploads/2007/08/trans%20%20April%202007.pdf> diakses tgl 10 Februari 2008



Latar belakang sejarah wilayah selatan Thailand yang mayoritas muslim sangat berbeda dengan wilayah utara (Siam) yang mayoritas Budha. Pattani misalnya, negeri ini tidak merasa menjadi bagian dari Siam, karena baik secara ideologi, budaya, maupun agama jelas tidak sama. Sikap pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyatu dalam sebuah negeri Budha tanpa mendapatkan kompensasi yang layak, bahkan sampai dipasung kebebasannya untuk melaksanakan ajaran agama Budha. Tentu saja, hal ini menyebabkan keinginan masyarakat muslim di wilayah selatan untuk melepaskan diri dari pemerintahan Thailand. Sementara pemerintah Thailand menghadapinya dengan tindak kekerasan. .

Persengketaan antara penduduk muslim dan pemerintahan Thailand itu terus memanas hingga dekade 70-an. Pembunuhan dan berbagai tindak kekerasan lainnya sering dialami oleh para aktivis Islam. Hal ini menimbulkan munculnya berbagai organisasi yang berhaluan keras menuntut kemerdekaan Pattani, seperti *Pattani United Liberation Organization* (PULO), Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP), dan Barisan Revolusi Nasional (BNP). Gerakan separatis ini memiliki ciri-ciri dan karakteristik perjuangan yang berbeda-beda meskipun mempunyai tujuan yang sama yaitu membebaskan daerah melayu muslim dari kekuasaan pemerintah Thailand.

Dalam konflik gerakan separatis di Thailand Selatan terdapat sesuatu yang unik jika dibandingkan dengan gerakan separatis di negara-negara lain. Hal ini dapat dilihat bahwa Muslim di Thailand Selatan berbeda dengan Muslim di wilayah Thailand lainnya yang relatif lebih mudah menerima asimilasi dan menerima dirinya sebagai Thai, sedangkan di wilayah Selatan masyarakatnya sangat bangga dengan identitas Melayu dan Islam sebagai corak hidup sehari-hari, akan tetapi itu hanya sebatas kebanggaan pada identitas dan tidak mengganggu koeksistensi dengan Buddha.

Muslim di Thailand Selatan tidak keberatan memilih pemeluk Buddha sebagai Walikota di wilayah Selatan. Namun yang lebih penting untuk ditekankan adalah Pemerintah Thailand yang tidak mau mengerti budaya dan aspirasi warga Thailand Selatan. Muslim di Thailand Selatan yang tidak mau menghilangkan identitasnya, sementara disisi lain justru dipandang pemerintah pusat penting demi sebuah Thailand yang utuh. Hal- hal seperti inilah yang dapat memicu timbulnya konflik di Thailand.

Kekerasan yang berlangsung di Thailand Selatan masih terus berlanjut, hal ini juga akan berakibat sangat fatal bagi kondisi keamanan kawasan Thailand, Apabila konflik di Thailand tidak selesai, maka konflik itu akan merembet pada kestabilan negara-negara tetangga.

Pengalaman di dunia menunjukkan bahwa separatisme tidak akan ada habis-habisnya dan tidak akan membawa keamanan dan perdamaian. Konflik masih menjadi permasalahan utama dalam kerangka hubungan internasional, hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik dengan berlandaskan pada konsep gerakan separatis, teori konflik dan konsep keamanan nasional. Penulis akan menelusuri lebih lanjut mengenai *“Gerakan Separatis Pattani Sebagai Faktor Konflik Dan Pengaruhnya Terhadap Aspek Keamanan di Thailand”*

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Perbedaan suku, agama, bahasa maupun ideologi serta adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok atau daerah yang mengakibatkan adanya kecemburuan sosial dan menanggung frustrasi serta kekecewaan yang berlarut-larut akibat sikap pemerintah yang diskriminatif, tidak adil dan mengesampingkan hak-hak kaum minoritas telah banyak menimbulkan konflik di berbagai negara. Konflik tersebut memiliki dampak

yang sangat besar bagi negara yang mengalaminya, dari segala aspek baik itu dari bidang sosial, kebudayaan, ekonomi, politik, keamanan dan stabilitas kawasan negara tersebut

Meskipun yang dimaksud dengan segala aspek bidang yang memiliki dampak dari gerakan separatis Islam di Thailand Selatan, namun dalam penelitian ini penulis membatasi pengaruh gerakan separatis Islam hanya pada satu aspek yaitu aspek keamanan. Karena aspek keamanan inilah yang paling menunjukkan pengaruh dari adanya konflik antara gerakan pattani dengan pemerintah Thailand terhadap keamanan di Thailand. Adapun dalam bidang lainnya, pengaruh yang diberikan hanya dalam bentuk gambaran umum.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh gerakan separatis Pattani terhadap aspek keamanan di Thailand ?
- b. Bagaimana kebijakan pemerintah Thailand dalam menciptakan keamanan di Thailand ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh gerakan separatis Pattani terhadap aspek keamanan di Thailand.
- b. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Thailand dalam menciptakan keamanan di Thailand.

2. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian diatas telah tercapai, maka penelitian ini diharapkan:

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penentu kebijakan khususnya untuk menganalisis persoalan gerakan separatis Islam di Thailand Selatan, sehingga dapat mengantisipasi gerakan-gerakan separatis serupa yang mungkin terjadi dalam konstelasi hubungan internasional.
- b. Dapat memberi tambahan informasi terhadap pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional.

D. Kerangka konseptual

Percaturan politik internasional dewasa ini masih sering diwarnai oleh berbagai ancaman konflik baik itu di dalam skala internasional, regional maupun lokal. Ancaman tersebut dapat menimpa negara mana saja dan dapat berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakatnya. Khususnya negara-negara berkembang yang memiliki kemajemukan, mereka cenderung menghadapi konflik yang berskala lokal.

Adapun yang dimaksud konflik oleh Miall adalah:

Pengejaran tujuan yang saling bertentangan dari kelompok-kelompok yang berbeda, menunjukkan rentangan dari kelompok-kelompok yang berbeda, menunjukkan rentangan waktu yang lebih luas dan kelas perjuangan yang lebih lebar dibandingkan dengan konflik bersenjata, entah itu diikuti oleh sarana perdamaian ataupun dengan menggunakan kekuatan (Sejumlah ahli teori membedakan antara pertikaian dengan kepentingan yang dapat dinegosiasikan dan yang dapat diatasi oleh kompromi, dan konflik yang lebih dalam melibatkan kebutuhan manusia dan hanya dapat dipecahkan dengan menghilangkan penyebab tersembunyinya).⁸

⁸ Hugh Miall, 1999, *Resolusi Damai Konflik Internasional: Mencegah, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, dan Budaya*, Penerbit Gramedia, Jakarta, halaman Tri Budhi Satrio, PT. Raja Grafindo : Jakarta, hal. 28-29

Umumnya konflik lokal sering melibatkan kelompok-kelompok perlawanan yang memiliki (antara lain) tujuan politik, berupa berusaha memperoleh kendali negara. Terkait dengan kasus konflik di Thailand, tampak bahwa kehadiran gerakan separatis Thailand Selatan adalah bertujuan untuk memperoleh kebebasan untuk memisahkan diri dari pemerintahan Thailand karena penduduk di Thailand Selatan mengalami diskriminasi. Selain itu warga Thailand Selatan juga dipaksa untuk menyatu dengan kelompok mayoritas dengan resiko kehilangan sebagian atau bahkan keseluruhan identitas sosial, kultural, dan keagamaan.

Konflik menurut Weiss adalah sesuatu yang terjadi karena adanya ketidaksepakatan, tidak terbuka, tidak bersahabat atau tidak kooperatif tentang apa yang benar, baik atau indah dalam suatu lingkup masyarakat.⁹ Adanya berbagai macam konflik yang saat ini terjadi membuat ahli-ahli teori politik mengelompokkannya menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari pelakunya, Miall mengklasifikasikannya menjadi dua yaitu konflik antar negara dan konflik bukan antar negara.¹⁰ yang menunjukkan adanya pertentangan yang terjadi antara atau lebih. Sedangkan konflik bukan antar Negara atau yang juga diistilahkan sebagai konflik internal ataupun perang saudara adalah konflik yang berlangsung di dalam negeri atau konflik antar pemerintah pusat dengan salah satu daerah atau beberapa daerah yang dipicu oleh perlakuan tangan besi pemerintah di masa lampau.¹¹

Konflik pada setiap tatanan kehidupan tentu terdapat sikap pro-aktif untuk menyelesaikan, entah dari negara yang berkonflik itu sendiri ataupun adanya pihak

⁹ T. May Rudi, 2003, *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global: Isu, Konsep, Teori dan Paradigma*, Relika A. P. Bandung, hal. 76

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

ketiga (*awards*). Terciptanya perdamaian tidak hanya terkait pada hubungan antara negara-negara yang bertikai, melainkan perlu adanya upaya dari masyarakat internasional untuk memberi sumbangsih terhadap permasalahan yang dihadapi. Terlebih dalam konteks persoalan gerakan separatis Islam di Thailand Selatan yang menjadi kunci kestabilan di Asia Tenggara.

Usaha untuk menjaga perdamaian yang ditujukan guna menghentikan atau mengurangi manifestasi kekerasan konflik melalui intervensi kekuatan militer dalam sebuah peran penengah antar pihak yang bertikai, penciptaan perdamaian yang ditujukan pada rekonsiliasi politik dan sikap strategis melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi terutama pada level elit dan pembentukan perdamaian yang tertuju pada implementasi praktis perubahan sosial secara damai.

Gerakan Separatis adalah suatu paham yang mencari keuntungan dengan pemecahan belahan suatu golongan atau bangsa dengan tujuan untuk memperoleh dukungan..¹² Meningkatnya agitasi separatis dan etnik sebagian karena kenyataan bahwa, berlawanan dengan keyakinan umum, prinsip penciptaan negara sejak Perang Dunia II, lain dengan penciptaan negara setelah perang Perang Dunia I, tidak hubungan dengan penentuan nasib sendiri.

Untuk membandingkan separatisme, perlu dibedakan tiga unsur penyebab, proses dan hasilnya. Penyebab separatisme sering kali sejarah yang berbeda, ketidakadilan atau keragaman identitas. Sementara itu, dalam prosesnya separatisme memunculkan gejala yang mirip internal war dan negosiasi. Keberhasilan separatisme dipermudah oleh

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, hal 919

berbagai variable, sejarah pembentukkan negara bangsa yang dipaksakan (misalnya Uni Soviet) atau jika suatu negara-Bangsa tadinya terdiri atas berbagai kesatuan politik Tradisional (kerajaan) misalnya Yordania.¹³

Faktor yang paling dominan bagi keberhasilan separatisme adalah faktor kekuasaan baik dalam maupun luar negeri. Jika pemerintah pusat mempunyai kemampuan dan kemauan dalam militer dan diplomasi untuk menentangnya, separatisme sulit berhasil. Untuk sebagian besar, hal ini karena separatisme sering sekali berbentuk *internal war* biasanya kekuatan militer pusat yang lebih unggul secara kualitatif. Selain itu, PBB atau lingkungan internasional sangat mendukung munculnya negara baru karena paham dekolosasi, tapi hal ini tidak terjadi pada kasus separatisme.

Sejak melakukan aksinya menentang pemerintah Thailand, kehadiran gerakan separatis Islam di Thailand Selatan telah menyebabkan konflik yang berkepanjangan dengan aparat militer di Thailand. Masyarakat hidup dalam ketakutan, aktivitas sehari-hari mereka terganggu akibat adanya konflik tersebut. Dan hal ini membuat situasi dalam negeri Thailand menjadi tidak terkendali. Selain itu konflik yang disebabkan oleh aksi-aksi gerakan separatis Thailand selatan juga telah mempengaruhi stabilitas keamanan di negara tersebut.

Menurut **Walter Lippman** konsep keamanan adalah:

Suatu bangsa yang terjamin luas jika didalamnya tidak terdapat bahaya dan ada keinginan untuk menghindari perang dan jika ditantang untuk mempertahankan kemenangan seperti dalam perang.¹⁴

¹³ *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*, hal 193

¹⁴ Anak Agung Banyu Perwira, Yanyan Mochmad Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 121

Sementara itu, **Arnold Wolfers** memaknakan konsep keamanan sebagai berikut:

Keamanan dalam tujuan apa saja berguna bagi langkah ketiadaan ancaman yang diperoleh dari ketidak hadiran ketakutan bahwa hal seperti itu akan mengakibatkan serangan.¹⁵

Dari beberapa defenisi diatas menunjukan persamaan dalam hal kebebasan terhadap ancaman-ancaman (militer) namun, konsepsi diatas juga secara jelas mengindikasikan perbedaan "*referent*" atau aktor keamanan (individual, nasional atau internasional). Secara tradisioanal, konsep keamanan selama ini memang hanya merujuk pada sifat ancaman yang bersifat militer semata dan mengfokuskan pada aspek negara. Konsep keamanan kini dapat dikaji sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrim antara kekuatan dan perdamaian.

Menurut Buzan, *Keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (survival)*.¹⁶ Kemudian analisis keamanan memerlukan suatu cara pandang yang menempatkan Negara dan system ke dalam sebuah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dimana sebagian terbentuk dengan sendirinya dan sebagian lain dibentuk oleh lingkungan anarki yang kompetitif dan sengit. Lingkungan dan dinamika internasional keduanya hal penting bagi analisis keamanan dalam upaya memahami hubungan yang kompleks diantara keduanya. Defenisi ancaman keamanan diatas selain menunjukkan adanya perluasan makna dari prospektif tradisional menuju non tradisional juga melibatkan aktor yang beragam (*non state*) yang terlihat dari dinamika interaksi antar sektor dan faktor keamanan.

¹⁵ Ibid, hal 121

¹⁶ Ibid, hal 122



E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu wilayah serta mengaitkannya antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis menggambarkan mengenai pengaruh gerakan separatis Islam di Thailand selatan yang juga telah mempengaruhi politik dan keamanan di Thailand.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yaitu data berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian mengenai konflik, gerakan separatisme, stabilitas keamanan dan politik.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data telaah pustaka. Yaitu pengumpulan data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas baik itu dari buku, majalah, surat kabar, jurnal maupun bahan-bahan yang diakses melalui internet. Adapun tempat-tempat penulis kunjungi selama penelitian adalah:

1. Perpustakaan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin
3. Perpustakaan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional
4. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang menganalisa data-data yang berupa fakta maupun peristiwa tentang apa yang akan dibahas.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode deduktif, dimana penulis terlebih dahulu akan menggambarkan secara umum, lalu kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Gerakan Separatis

Separatis merupakan salah satu wujud utama perang modern yang disebabkan oleh nasionalis yang mencoba melepaskan diri dari satu negara untuk membentuk suatu negara baru. Gerakan separatis ini umumnya muncul dari kelompok minoritas yang merasa terpisah dan berbeda. Tuntutan umum dari gerakan separatis berupa pemisahan wilayah untuk membentuk sebuah negara tersendiri atau tidak jauh dari bentuk ekstrem ini, sebatas otonomi internal yang bebas dari pengaturan induk. Tuntutan separatis ini biasanya ditolak pemerintah yang berkuasa karena dianggap dapat mengancam integritas dicapai tanpa konflik senjata antar kelompok yang tertindas atas tersingkir melawan kepentingan pihak penguasa lahiriah tuntutan teritorial dan politik militan yang diorganisir atas dasar prinsip-prinsip identitas, etnik, bangsa, agama dan rasial.

Suatu kelompok etnis akan merasa dirinya aman jika mereka turut serta secara aktif dalam pemerintahan; baik melalui lembaga politik seperti dalam partai yang inklusif, partisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Namun, apabila suatu golongan etnis terlalu menguasai pemerintah, maka golongan-golongan lain mempunyai alasan untuk meyakini kredibilitas.

Pemerintah dalam melindungi kepentingan dan keamanan kelompok, golongan, ras dan etnisitas lainnya. Keadaan seperti ini sering ditanggapi dari golongan yang terbesar dengan dua jalan : Pertama, mencoba merebut kekuasaan dari pemerintah yang berkuasa; kedua, mencoba melepaskan diri (separatisme) keduanya dapat dilakukan dengan cara kekerasan.

Seperti yang diungkapkan oleh Moerdiono separatis merupakan dari anti tesis terhadap nation state dari pemerintah yang ada, dan berkehendak mendirikan nation state serta pemerintah sendiri. Ancaman separatis terhadap negara nasional tidak dapat dipandang ringan, baik pada negara nasional baru maupun pada negara nasional yang sudah tua.¹⁵

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Cristie bahwa :

Separatisme merupakan "penyakit" pada tubuh politik negara pusat yang merupakan tanggung jawab ahli pemerintah untuk segera mengidentifikasi sebab dan gejalanya dan serta segera mungkin menentukan langkah-langkah "pengobatannya."¹⁶

Ditambahkan pula oleh Moerdiono, bahwa :

Separatis yang terjadi pada negara nasional baru maupun pada negara-negara nasional yang sudah lama itu sesungguhnya adalah manifestasi dan integrasi nasional yang terhenti, terganggu belum selesai atau justru mengalami retrogesi.¹⁷

Nasionalisme, separatisme dan stabilitas memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nasionalisme merupakan suatu identitas kelompok kolektif yang secara emosional mengingat banyak orang menjadi satu bangsa.

¹⁵ Ikhlalul Amal, *Regiolisme, Nasionalisme, Dan Ketahanan Nasional*, 1998 Hal 11

¹⁶ Isaac, Harold R., *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis: Identitas Kelompok Dan Perubahan Politik*, 1993 Hal 24

¹⁷ Ibid

Secara umum dapat dikatakan bahwa nasionalisme yang menjadi unsur pembentukan negara masih sangat kuat, namun kinerja negara yang tidak dapat meningkat secara drastis dapat menimbulkan kecewa pada rakyatnya. Rasa kecewa yang ringan diekskresikan dalam bentuk yang lunak dan disalurkan melalui proses politik yang biasa. Namun rasa kecewa yang berat dan berkepanjangan akan diekskresikan dalam bentuk kekerasan melalui gejolak-gejolak politik dan keamanan. Hal ini dapat membahayakan eksistensi nasional negara itu sendiri. Jika rasa kecewa yang bersifat endemis tersebut dikristalisasikan serta dimanipulasikan oleh tokoh-tokoh pimpinan daerahnya, hasilnya akan melahirkan separatisme yang tidak mungkin akan ditoleransi oleh pemerintah pusat manapun juga.

Ada unsur nasionalisme di dalam separatisme yaitu keinginan untuk membangun masa depan bersama dari penduduk yang mendiami wilayah tertentu yang secara ekonomi, politik dan kultural merupakan suatu komunitas yang mempunyai rasa solidaritas yang erat, masalahnya adalah bibit nasionalisme, belum atau tidak lagi dilayakkan dalam konteks nations state yang lebih luas, walaupun sesungguhnya wilayah tersebut secara yuridis konstitusional merupakan wilayah dari nation state tersebut. Dengan demikian, dalam jangka pendek separatisme akan mewujudkan konflik penguasaan teritorial dan dalam jangka panjang merupakan konflik ideologi, ekonomi, politik dan kultural.

Isu separatisme tidak terlepas dari isu identitas dimana pada masa dekolonisasi gerakan separatisme tersebut muncul sebagai upaya untuk mempersatukan seluruh komunitas, kebudayaan dan agama di dalam negara kolonial

menuju konsep keluarga nasional. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh W.K. Che Man bahwa hak penentuan nasib sendiri adalah hak penting bagi setiap orang sebagaimana yang dikutip dari perkataan Woodrow Wilson yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menentukan kedaulatan di mana mereka akan hidup.¹⁸

Fase Separatis dan tuntutan kelompok etnis yang bersifat memecah belah sekarang ini tidak mempunyai program atau Prospek yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa, hanya sekedar ingin menjalankan suatu proyek sejarah, maka fase ini mengemukakan kembali model Mazinian yang asli yaitu bentuk negara teritorial yang homogen secara etnik dan linguistik ("setiap bangsa untuk sebuah negara hanya satu negara untuk setiap bangsa").

Separatisme dari suatu kelompok masyarakat atau koalisi dari beberapa kelompok, timbul terutama disebabkan karena mereka ingin melepaskan diri dari kontrol pemerintah pusat baik secara defacto maupun secara dejure, di mana gerakan tersebut bisa dianggap sebagai suatu usaha oleh minoritas etnis tertentu di kawasan pinggiran suatu negara untuk memperoleh otonomi politik dan kekuatan pusat. Banyak faktor yang mendasari lahirnya gerakan separatisme oleh suatu kaum minoritas, terhadap kaum mayoritas di dalam suatu negara. Salah satunya adalah terabaikannya partisipasi politik, ketimpangan di bidang ekonomi dan pembangunan

¹⁸ W. Kche Man, *Muslim, Separatism; The moros of Southem Philippines and The Malays of Southern Thailand*, Oxford University Press: Singapore, 1990, hlm. 179

serta perlakuan yang tidak adil yang dilakukan pihak kaum mayoritas yang memerintah terhadap kaum minoritas.

Secara umum Walter S. Jones mengelompokkan masalah-masalah tersebut dalam konflik separatisme sebagai berikut :

1. Akibat ketimpangan di bidang ekonomi, meskipun masalah teritorial dalam separatisme bermula dari masalah etnis, masalah tersebut selanjutnya merembet ke masalah ketimpangan di bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.
2. Dilema moral, merupakan gerakan separatis yang memperhatikan masalah moral bagi sistem Internasional, baik untuk menentukan nasib bangsa sendiri maupun sebuah nilai mulia sehingga banyak dilakukan oleh kaum separatis untuk memisahkan diri.
3. Para pengamat yang cenderung mendukung perjuangan bangsa dalam merebut wilayah mereka sendiri. Namun kerumitan etnogeografis tersebut tidak memungkinkan dunia Internasional mendukung setiap kelompok yang menghendaki wilayah sendiri terpisah dari wilayah lainnya.
4. Tapal batas wilayah kolonial, banyak kaum minoritas yang frustrasi menyalahkan Imperialisme masa lalu sebagai penyebab permasalahan yang mereka hadapi, pelanggaran tapal batas garis etnik, hal ini dilakukan hanya merupakan hasil kesepakatan antar negara besar. Garis batas tersebut jarang

memperhatikan garis alam pusat pemukiman suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya.¹⁹

Pada esensinya gerakan separatisme memiliki 2 tahap utama, yaitu:

1. Tahap Formatif, merupakan suatu konflik antara pusat dan pinggiran yang muncul berbagai kondisi yang dalam hal ini menyebabkan timbulnya kekerasan dalam pola hubungan antar kedua belah pihak, tahap ini berlangsung melalui proses yang disebut proses diferensiasi (pencarian identitas) dan proses modernisasi (penyeragaman kultural).
2. Tahap Kompleksitas, kehidupan masyarakat ditandai dengan adanya peningkatan intraksi maupun intervensi dari berbagai kelompok yang inferior. Kompleksitas masalah yang dimaksud adalah:
 - a. Fragmentasi merupakan nilai-nilai yang ada dalam politik nasional, seringkali justru tidak mencakup mekanisme untuk mencegah konflik yang mungkin timbul, tetapi bahkan meningkatkan potensi bagi konflik dan eskalasinya.
 - b. Divergensi merupakan kepentingan antara kelompok etnis dan lainnya, hal ini dapat dilihat dalam kasus siapa yang berhak mengelola atas sumber daya yang semakin langka.
 - c. Intervensi asing dan subversi yang mempersulit kompleksitas konflik yang terjadi dalam suatu negara.

¹⁹ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional ; Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia*, 1993. Hlm. 187-188

- d. Sikap pemerintah yang semakin kuat untuk menghadapi dan mengikis kelompok etnis yang memberontak.²⁰

B. Teori Konflik

Dalam jagad yang luas ini, konflik merupakan salah satu aspek kehidupan manusia yang alamiah. Jagad raya inipun terbentuk dari konflik dua atom yang saling bertentangan, mengikat, pecah dan membentuk *struggle of universe*.²¹ Namun setiap konflik tentu berpulang kepada makhluk yang terlibat di dalamnya. Hewan yang terlibat dalam konflik selalu mengedepankan hukum yang kuat memangsa yang lemah, dan tentu saja manusia sebagai makhluk berakal dengan konflik sosialnya yang sangat krusial.

Interaksi antar individu, kelompok ataupun bangsa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satu bentuk interaksi itu adalah konflik (*conflict*). Pada dasarnya, konflik dapat diartikan sebagai perbedaan atau pertentangan tujuan antara dua pihak atau lebih. Beberapa pakar bahkan mengklasifikasikan konflik sebagai bagian dari interaksi antar negara dan oleh karena konflik merupakan hal yang wajar terjadi dalam hubungan internasional. Pendapat itu didukung oleh Dahlan Nasution mengemukakan bahwa "Konflik merupakan persaingan, apakah luas, semu atau masih bersifat potensi adalah suatu yang normal dalam hubungan antar negara yang bermula dari sistem negara kebangsaan. Meskipun demikian, setiap konflik

²⁰ Soichumband Peribetra dan Chai Anand Samuda Vanija, *Menatap Separatisme di Asia Tenggara*, Media Indonesia, 1992.

²¹ David Mellus, *Jejak Langkah Pemikiran Plato*, Yogyakarta, Yayasan Benteng Budaya, 2002, hal.39

membutuhkan penyelesaian karena apabila dibiarkan akan menjadi ancaman terhadap keamanan dan politik Internasional.²²

Selanjutnya Lewis Loser berpendapat bahwasannya konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat tidak perlu ditakuti, tidak perlu dianggap suatu yang bersifat patologis. Malah konflik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat dalam perubahan sosial. Pendapat bahwasannya konflik mempunyai fungsi penting dalam masyarakat yang dikemukakan oleh Lewis Loser, yang berfungsi sebagai berikut :

1. Konflik adalah bentuk interaksi
2. Konflik dapat merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, mempertegas sistem sosial yang ada.
3. Dengan adanya konflik dalam setiap masyarakat sering kali berkembang satu atau beberapa mekanisme untuk meredakan ketegangan yang ada sehingga struktur masyarakat sebagai keseluruhan tidak terancam.²³

Konflik secara sosial merupakan bentuk interaksi yang melibatkan individu, kelompok maupun negara. Dalam perspektif sosiologi menurut Gillin and Gillin, bahwa " Konflik adalah suatu proses interaksi sosial yang merupakan bentuk oposisi dari keragaman (*operational processes*) atau disebut interaksi yang disosiatif". Sementara itu Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa "Konflik adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi

²² Marpung, Rusdi, *Konflik Multikultur*, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2000, hal 32

²³ Maria E. Pandu, *Konflik Sosial Dalam Tinjauan Sosiologi*, 2000, hal 3

memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan".²⁴

Hal serupa yang dikemukakan oleh Miall : Konflik merupakan aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas nilai yang keyakinan yang muncul sebagai formasi yang ditimbulkan dari pertanahan sosial yang muncul heterogenitas dengan hambatan yang diwariskan.²⁵ Konflik seringkali menunjuk pada situasi dalam kelompok identitas daro manusia (apakah itu kesukuan, etnik, bahasa, agama, sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya), yang melakukan sesuatu secara sadar dalam keadaan bertentangan antara satu dengan yang lain kelompok identitas manusia dengan tujuan untuk mengejar kepentingan-kepentingan tertentu.

Pada tataran studi ilmu hubungan Internasional, secara garis besar konflik dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu konflik antar negara (*intersate*) dan konflik dalam-negara (*intrastate*). Secara sederhana kedua konflik tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut : Konflik *Interstate* adalah konflik antara dua atau lebih negara berdaulat. Sedangkan, konflik *Intrastate* adalah konflik antara faksi-faksi dalam sebuah negara.

Pada mulanya konflik *Interstate* (antar negara) merupakan salah satu fokus utama dalam dunia Internasional. Namun, setelah berakhirnya perang dingin kuantitas dan kualitas konflik *Intrastate* mengalami pengikatan secara drastis. Peningkatan ini

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, hal. 106

²⁵ Ramsbothan Miall dan Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2000, hal. 8

juga diikuti juga oleh akibat-akibat yang ditimbulkan dan aktor-aktor yang terlihat di dalamnya.

Sebuah konflik *Intrastate* atau konflik antara faksi-faksi dalam sebuah negara bukan tidak mungkin akan melibatkan negara tetangganya mendukung salah satu pihak yang berkonflik. Jika negara tetangganya menganggap bahwa konflik tersebut juga mempertaruhkan kepentingan nasional negara tersebut.

Konflik di Thailand Selatan adalah konflik *Intrastate* yang kompleks dalam aspek agama, etnisitas dan politik sehingga mempengaruhi segala aspek bidang di Thailand. Konflik ini bersumber dari tumbuhnya sikap anti pemerintahan pusat yang dilakukan oleh muslim di Selatan Thailand diakibatkan banyak hal seperti kesenjangan ekonomi dan kebijakan asimilasi yang diharapkan oleh kerajaan Thai, menimbulkan pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut.

Kesenjangan ini telah berlangsung puluhan tahun, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Edwar Azar dengan teorinya mengenai konflik sosial yang berlarut-larut, *protracted social conflict* (PSC), menyatakan bahwa "Konflik merupakan representasi dari perjuangan berkepanjangan yang seringkali penuh kekerasan oleh kelompok Komunal untuk keperluan dasar seperti keamanan, pengakuan bahwa suatu pemerintahan tidak langsung tidak praktis lagi untuk dijalankan".²⁶

Konsep di atas cukup relevan bila melihat latar belakang konflik di Thailand Selatan yang sejak tahun 1902 sampai pada pertengahan tahun 2007. aksi-aksi

²⁶ Badrus Sicheh, *Minoritas Muslim, Konflik Dan Rekonsiliasi Di Thailand Selatan*



kekerasan dan teror, pembunuhan, penculikan dan peledakan bom terus-menerus mewarnai suasana di empat Provinsi di Thailand Selatan termasuk Provinsi Sangkla telah mengakibatkan lebih dari dua ribu korban jiwa yang tewas.

Konflik kekerasan dalam politik Internasional dan konflik tanpa kekerasan, sasaran konflik yang dapat dibagi dua dalam garis besarnya : Pertama, konflik dengan sasaran keseimbangan (*balancing objective conflict*) yang bertujuan untuk mencapai keadaan seimbang, mengenai suatu masalah yang dipertentangkan”.²⁷

Konflik yang terjadi dapat berwujud perlawanan bersenjata (oleh pihak yang menentang atau yang memberontak) dan penumpasan dengan kekerasan (oleh pemerintah), bisa pula hanya konflik pada tataran elit politik dan tanpa menggunakan kekerasan bersenjata. Ted Robert Burr dalam tulisannya "*Why Men Rebel*" mengemukakan bahwa :

Bisanya konflik dengan menggunakan kekerasan terjadi dalam suatu masyarakat karena adanya rasa kekecewaan (*frustasi*). Frustrasi timbul berkaitan dengan meningkatnya harapan-harapan (*expectations*) yang tidak terpenuhi atau tidak terakomodasi dalam suatu sistem politik (suatu masyarakat atau negara). Frustrasi menimbulkan perasaan tertindas oleh kelompok lainnya atau oleh pemerintah, lalu berlangsunglah konflik termasuk konflik dengan menggunakan kekerasan”.²⁸

Suatu konflik terbuka tidak langsung muncul ke permukaan tanpa melalui suatu tahapan-tahapan peningkatan ketegangan (*eskalasi konflik*). Beberapa peneliti masalah konflik memberikan tahapan-tahapan yang agak berbeda namun pada dasarnya memiliki alur yang sama, misalnya menurut *Miall Ramsbotham* dan *Woodhouse* ada beberapa tahapan yang terjadi dalam proses konflik, yaitu :

²⁷ Dahlan Nasution, *Politik Internasional: Konsep dan Teori*, Jakarta: Remaja Karya, 1991, hal. 54

²⁸ Analisis CSIS Tahun XXX/ 2001, No 3, Hlm 146

1. Situasi damai yang stabil yakni tingkatan tertinggi stabilitas politik dan legitimasi rezim.
2. Situasi tekanan politik, yakni timbulnya tingkatan hambatan sistemik dan meningkatnya perpecahan sosial politik.
3. Konflik politik dengan kekerasan yakni tekanan naik menjadi "krisis politik" karena ada "erosi legitimasi politik pemerintah nasional" yang secara kasar dikuantifikasikan dalam artian jumlah orang-orang yang terbunuh, termasuk konflik dengan jumlah sampai dengan 100 orang.
4. Konflik dengan intensitas lebih tinggi, kekerasan dan konflik bersenjata terbuka diantara kelompok-kelompok faksional. Penindasan rezim dan pemberontakan, dengan 100-999 orang terbunuh setiap tahunnya.
5. Konflik dengan intensitas tertinggi berupa perang diantaranya kelompok yang berseteru dan/atau kerusuhan massal dan pemindahan sektor-sektor penduduk sipil dengan 1.000 penduduk atau lebih yang terbunuh.²⁹

Sementara itu, Erik Brahm juga memberikan tahapan-tahapan konflik yang lebih spesifik, di mana Erik Brahm membagi proses konflik ke dalam 8 tahapan ⁽²²⁾, yaitu :

1. *No conflict*

Situasi damai tanpa konflik.

2. *Latent conflict*

²⁹ Miall et al. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras.* (Jakarta,2000), hal. 34

Latent conflict muncul ketika individu-individu kelompok-kelompok ataupun negara memiliki perbedaan yang mengusik. Namun, perbedaan itu belum cukup besar untuk membuat salah satu pihak bertindak untuk mengubah situasi (status quo). *Latent conflict* biasanya disebabkan perbedaan kondisi ekonomi dan akses pada sumber-sumber kekuasaan (politik).

3. *Emergence*

Setelah beberapa lama konflik pada tahapan *Latent conflict* akan mulai muncul ke permukaan jika rasa marah dan frustrasi dari salah satu kelompok sudah tidak terbendung lagi. Tahap *Emergence* merupakan situasi dimana konflik pertama kali muncul, tetapi secara sporadis atau intensitasnya rendah.

4. *Escalation*

Pada tahapan ini, konflik sporadis yang muncul pada tahapan *Emergence* mengalami peningkatan intensitas. Jika konflik mencapai tahapan ini maka akan semakin banyak orang atau pihak yang terlibat. Masing-masing pihak atau kelompok yang terlibat masing-masing pihak atau kelompok yang terlibat mulai melakukan konsolidasi kelompok.

5. *Stalemate (Hurting)*

Tahapan ini merupakan puncak atau klimaks dari suatu konflik. Dimana konflik mencapai situasi equilibrium antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik menyadari bahwa mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara keseluruhan dan tidak mampu melanjutkan konflik karena

biaya yang sangat tinggi (sumber daya), perubahan aliansi maupun kegagalan taktik konflik.

6. *De-Escalation/Negotiation*

Pada tahapan ini, kelompok-kelompok yang berkonflik mulai melunakkan sikap dan tuntutan pada pihak lain. Karena pihak yang berkonflik mulai menyadari bahwa tujuan ataupun tuntutan tidak akan dapat terpenuhi seluruhnya dan mulai mencari jalan damai secara konstruktif. Intensitas konflik mulai menurun meskipun tidak sepenuhnya berhenti.

7. *Dispute Settlement/Resolution*

Pada tahap ini, pihak-pihak yang berkonflik memunculkan sebuah tujuan bersama (*uniting goad*) tetapi di lain pihak, hal ini juga akan memunculkan beberapa pihak atau faksi di dalam kedua pihak yang merasa tidak puas dengan hasil yang dicapai dari kedua kelompok. Kelompok-kelompok yang berkonflik akan mulai saling mengakomodir tuntutan masing-masing meskipun tidak secara keseluruhan. Tahapan ini biasanya ditandai dengan adanya kesepakatan berupa perjanjian damai.

8. *Post-Conflict Building and Reconciliation*

Meskipun menyelesaikan damai dalam perjanjian damai telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, hal ini hanya terjadi pada tataran elit politik saja.³⁰

³⁰ Eric Brahm "Conflict Stages." *Beyond Intractability Organization*
http://www.Beyondintractability.Org/m/conflict_stages.jsp

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa harapan-harapan konflik tidak harus ataupun selalu mengikuti pola linear seperti di atas, karena pada kenyataannya pola-pola konflik dewasa ini sangatlah dinamis. Sebuah negosiasi konflik tidak harus dilakukan setelah terjadinya stalemata konflik. Namun, dapat juga dilakukan bersamaan dengan eskalasi konflik untuk mencegah biaya yang lebih tinggi jika konflik mencapai klimaks.

Ada bermacam-macam hal yang dapat memicu timbulnya suatu konflik. Dari sudut pandang ilmu politik, konflik dapat terjadi akibat adanya kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horizontal yang dimaksud di sini adalah struktur masyarakat yang majemuk secara struktur seperti suku bangsa, daerah, agama dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha dan lain-lain. Sedangkan kemajemukan secara vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilihan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan.³¹

Kegagalan pemerintah Thailand dalam mengakomodasi seluruh kebutuhan dasar rakyatnya telah mengecewakan sebagian pihak, khususnya kaum Melayu-Muslim, yang akhirnya memicu timbulnya konflik separatis antara pemerintah Thailand dan kelompok gerakan separatisme di Thailand Selatan.

Sumber dari konflik terletak dalam hubungan antara sistem negara-negara kebangsaan negara itu sendiri yang dilandasi oleh beberapa konsep egosentris (kepentingan sendiri), yaitu aspirasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan dan kedudukan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Sifat dan hakiki dari kepentingan dan sasaran-sasaran yang

³¹ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta, 1992), hal 151-152



tercakup dalam kebijakan nasional dari negara-negara mempunyai kecenderungan menimbulkan konflik.³²

Sementara itu Steinbach mengemukakan bahwa penyebab munculnya konflik dapat digolongkan kedalam empat kategori pokok, yaitu :

1. Perpecahan bangsa
2. Perkembangan yang timpang
3. Bentrokan kultural
4. Terjadinya gerakan pembebasan.³³

Untuk melihat akar konflik yang terjadi dalam kehidupan manusia, kita biasa menggunakan teori spiral kekerasan yang dipaparkan oleh Dom Hewler Camara. Teori spiral kekerasan sebenarnya sangat ringkas namun jelas dan sudah dipahami. Teori ini dapat dijelaskan dari bentuknya ada bentuk kekerasan bertahap personal, institusional dan struktural, yaitu ketidakadilan, ketidaksihan, ketidakpercayaan diri dan ketidak percaya. Kelanjutnya saling terkait satu sama lain, ketidakadilan kekerasan akan dialami dan akan memperburuk kekerasan lainnya.³⁴

"Lihatlah pendekatan pada ketidakadilan di negara berkembang ... Anda akan menemukan dimana-mana ketidakadilan merupakan bentuk kekerasan & ketidakadilan dapat dialami oleh pemerintahan, kelompok maupun negara yang diakibatkan oleh bekerjanya ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi internasional".³⁵

³² Loc. cit. T. Ay Rudi, hal. 66

³³ Maria E. Rana, *Konflik Sosial Dalam Tinjauan Sosiologi*

³⁴ Dom Hewler Camara, 2000, *Spiral Kekerasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. x

³⁵ Badra Sobah, *Minoritas Muslim, Konflik Dan Rekonsiliasi Di Thailand Selatan*

Dari teori di atas kita dapat menemukan akar dari kekerasan adalah ketidakadilan sebagai segala bentuk kekerasan atau konflik seperti halnya dengan konflik yang terjadi di Thailand Selatan yang disebabkan karena adanya sikap diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat Thailand terhadap masyarakat muslim Thailand Selatan sehingga terciptalah kesenjangan sosial yang sampai perkembangannya belum mampu mengartikulasikan kepentingan masing-masing antara kedua belah pihak, sehingga aksi kekerasan masih terus berlanjut.

C. Konsep Keamanan Nasional

Berakhirnya perang dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan pasca perang dingin tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun, kini definisi keamanan meliputi soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik dan berbagai masalah sosial lainnya.

Pasca perang dingin keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara (*inter - state relations*), tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat. Ini artinya soal-soal yang dulu dipandang sebagai urusan internal suatu negara seperti lingkungan hidup, semakin memerlukan kerjasama dengan negara lain dalam cara mengatasinya.

Etnis, konflik antar negara maju dan negara terbelakang, pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim otoriter yang dibarengi oleh makin pesatnya proses globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menyadarkan para penempuh

Studi Hubungan Internasional, bahwa makna keamanan telah pesat berkembang seiring dengan proses peradaban manusia. Akibatnya penyelesaian keamanan yang lebih mengedepankan kekuatan militer dianggap hanya memberikan keamanan untuk sebagian orang, sementara di lain pihak sebagian lainnya merasa terancam penderitaan dan ketakutan.

Konsep keamanan adalah konsep yang masih diperdebatkan (*contested concept*), yang mempunyai makna berbeda bagi aktor yang berbeda, hal ini disebabkan makna konsep keamanan makin luas yang didorong dengan meningkatnya interdependensi dan semakin kompleksnya jaringan hubungan antar bangsa (*international relations*) dalam era globalisasi.

Seringkali kita juga terjebak dalam memandang keamanan nasional (*national security*) dengan keamanan dalam negeri (*internal security*) karena memiliki makna serta aktor yang berbeda. Keamanan dalam negeri menitikberatkan pada terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM. Sedangkan keamanan nasional adalah konsep yang terdiri dari elemen warga negara, lembaga pemerintahan serta kedaulatan dan keutuhan negara. Sehingga dapat diartikan bahwa keamanan nasional sebagai upaya politik pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi aman bagi terselenggaranya pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga mampu meraih tujuan dan kepentingan nasional

dari segala bentuk gangguan dan ancaman baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri.

Dari definisi itu terlihat bahwa konsep keamanan nasional merupakan *public goods* yang harus pemenuhannya dilakukan oleh pemerintah secara paralel dengan semangat konstitusi yaitu negara melindungi bangsa dan negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan persahabatan dunia. Konsep itu juga mencakup aspek non-militer serta memberikan peluang bagi aktor non negara untuk terlibat didalamnya sehingga menjadikan aktor non militer salah satu hal yang penting dalam konsep keamanan.

Keamanan Nasional adalah segala hal kepentingan nasional yang tak dapat dipisahkan. Bangsa suatu politik dan negara untuk mempertahankan kepentingan nasional. Keamanan *security* bukan sekadar kondisi atau keadaan suatu masyarakat atau keberlangsungan hidup bangsa dan negara. *National security* atau keamanan nasional menurut *International Relation & Political Dictionary* berbunyi: *The allocation of resources for the production, deployment and if what we may call the coercive facilities which a nation uses in pursuing its interest.* Terjemahannya adalah: "Pengalokasian sumber-sumber untuk produksi dan pelaksanaan alat apa yang disebut sebagai fasilitas koersif yang digunakan suatu negara untuk mencapai kepentingan-kepentingannya."³

³ Teuku May Rudi, *Studi Strategis*, Refika Aditama Bandung, 2002, Hal. 84

Secara tradisional, konsep keamanan selama ini memang hanya merujuk pada sifat ancaman yang bersifat militer semata dan memfokuskan pada aspek negara, dalam konteks ini, hirauan utama pembahasan ancaman baik tradisional dan non tradisional, juga mengacu pada definisi ancaman terhadap keamanan.

Richard Ullman, misalnya, mendefinisikan ancaman keamanan, sebagai

berikut: *a threat to national security is an action or sequence of events that (i) threatens drastically and over a relatively brief span of time to degrade the quality of life for the inhabitants to narrow the range of policy choices available to the government of state or to private, non-governmental entities (persons, groups, corporations) within the state.*³⁷

Isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prinsip-prinsip yang dimiliki oleh unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman eksistensial. Untuk itu diperlukan tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut agar ditangani sesegera mungkin dan menggunakan sarana-sarana yang ada untuk menangani masalah tersebut. Berdasarkan kriteria isu kemana, Buzan membagi keamanan ke dalam lima dimensi, yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tiap-tiap dimensi keamanan tersebut memiliki unit keamanan, nilai dan karakteristik survival dan ancaman yang berbeda-beda.³⁸

³⁷ Banyu Anak Agung, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarn: Bandung 2005. Hlm. 121-122

³⁸ *Ibid*, hlm 122

Dimensi pertama yang perlu kita ketahui dari konsep Keamanan adalah "*The origin of threats*". Bila pada masa perang dingin, ancaman-ancaman yang dihadapi selalu dianggap datang dari pihak luar / eksternal sebuah negara maka pada masa kini, ancaman-ancaman dapat berasal dari domestik dan global. Dalam hal ini, ancaman yang berasal dari dalam negeri biasanya terkait dengan isu-isu primordial seperti etnis, budaya dan agama. Konflik yang terjadi di Thailand Selatan juga diperuncing oleh karakteristik geografis (faktor alam dan sosial). Berbagai tindakan kekerasan (separatisme) yang dipicu oleh sentimen etnonasionalis yang terjadi di berbagai wilayah di Thailand telah pula menyedot perhatian nasional bahkan internasional.

Dimensi kedua adalah "*The nature of threats*". Secara tradisional, dimensi ini menyoroti ancaman yang bersifat militer, namun berbagai perkembangan nasional dan internasional sebagaimana disebut di atas telah mengubah ancaman menjadi jauh lebih rumit. Dengan demikian persoalan keamanan menjadi jauh lebih komprehensif dikarenakan menyangkut aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup dan bahkan isu-isu lain seperti demokratisasi, dan HAM.³⁹

Sebagaimana yang dikemukakan Peter Chalk, fenomena global kontemporer diwarnai oleh "Fenomena abu-abu" (*Grey Area Phenomena*). Fenomena ini secara longgar dapat didefinisikan sebagai "ancaman-ancaman terhadap keamanan stabilitas nasional dan internasional yang diakibatkan dari proses-proses interaksi aktor negara dan non negara.

³⁹ Loc.cit, Banyu Anak Agung, hlm 123-124

BAB III

GAMBARAN UMUM GERAKAN SEPARATIS ISLAM PATTANI DI THAILAND SELATAN

A. Profil Gerakan Pattani

1. Sejarah Berdirinya Gerakan Separatis Pattani

Pada awalnya Pattani adalah kerajaan Islam yang berdaulat. Dengan kekayaan alam yang dimiliki seperti, emas, timah, laka, kapur barus, perahu dan emboni serta ditunjang dengan pelabuhan terbaik di Semenanjung Malaya. Pattani merupakan daya tarik tersendiri bagi berbagai bangsa untuk melakukan pemiagaan di wilayah tersebut. Mulanya hanya bangsa Cina, India dan Arab yang melakukan aktifitas di pelabuhan Pattani. Namun pada tahap berikutnya bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Belanda, Inggris dan Perancis turut berniaga serta mendirikan institusi-institusi perdagangan dan industri. Misalnya Belanda mendirikan suatu kantor perdagangan pada tahun 1602, Portugis pada tahun 1610 serta Inggris dua tahun kemudian.

Pada masa itu, Pattani menikmati kebebasan dan kemakmuran yang bersumber dari pendapatan di bidang perdagangan dan aktivitas yang mengikutinya. Pattani merupakan kerajaan merdeka, dalam arti mempunyai struktur politik, sosial, budaya dan ekonomi sendiri sesuai dengan kultur Melayunya dan landasan agama Islam yang dianut kerabat kerajaan dan masyarakat. Masa ini merupakan masa keemasan dari Pattani Raya.

Disamping bangsa-bangsa barat, bangsa lain juga yang berambisi untuk mendapatkan pengaruh dari Pattani adalah kerajaan Thai (Siam). Berbeda dengan bangsa lain yang lebih berorientasi terhadap masalah perdagangan. Kerajaan Thai memandang Pattani sebagai area yang harus terhimpun dalam kerajaan Thai, sebagai sebuah teritori politik. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kali penyerbuan yang dilakukan Kerajaan Thai terhadap Pattani. Invasi pertama kali dilakukan oleh Suan Maharaj Pattani pada tahun 1603 Phranare, kemudian dilanjutkan oleh penggantinya yaitu Rama I pada tahun 1786 dan Rama III tahun 1832.

Penyerbuan-penyerbuan tersebut menyebabkan kekuatan Pattani Raya melemah dan berakhir dengan takluknya pada kerajaan Thai pada akhir abad 18. Wilayah tersebut kemudian berubah statusnya dari sebuah negara yang independen menjadi kerajaan tributary. Sebagai bentuk penyerahan Pattani terhadap Thai, Raja dan para bangsawan diwajibkan mengirimkan bunga Mas (semacam upeti berbentuk pohon yang terbuat dari emas dan perak) setiap dua setengah tahun sekali kepada Raja Thai yang bertahta di Bangkok. Namun demikian meski takluk pada Bangkok, Pattani bukan merupakan bagian integral dari kerajaan Thai. Secara cultural Pattani tetap otonom, tata cara pemerintahan dan pengaturan kehidupan sosial budaya tetap didasarkan atas sandi-sandi kebudayaan Melayu dan agama Islam. Institusi-institusi keislaman seperti mesjid, pondok dan qadi tetap berdiri kokoh. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Pattani dulu merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Asia

Tenggara. Akibat perkembangan kolonialisme yang semakin kuat di Asia Tenggara, Kerajaan Thai merupakan pembaruan administratif kerajaan demi keamanan dan efisiensi urusan negara. Selama ini struktur kerajaan Thai hanya berbentuk sekumpulan kerajaan kecil yang dipersatukan secara loggar tanpa memiliki suatu pusat kekuasaan yang tersentralisir. Sehingga kerajaan merasa perlu untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menyatukan satuan-satuan politik yang terpisah.

Raja Chulalongkorn (1868-1910) menginginkan suatu sistem administrasi baru berdasarkan pertimbangan keamanan nasional dan efisiensi urusan negara. Maka dibentuklah suatu sistem administrasi terpusat, yang menggantikan gabungan propinsi-propinsi yang longgar dan kerajaan Vassal. Reorganisasi yang dilakukan antara tahun 1892 sampai dengan 1910 tersebut dilakukan dengan membentuk sebuah sistem administrasi propinsi (the Saphuban) dan terpusat yang menyerupai konsep Inggris pada kerajaan-kerajaan Melayu di sebelah barat Thai.

Seiring dengan perubahan di atas, pada tanggal 20 Desember terjadi peristiwa penting bagi perjalanan sejarah bangsa Pattani. Pada tahun tersebut ditandatangani Perjanjian perbatasan antara wilayah jajahan Inggris di Semenanjung Malaya dengan kerajaan Thai. Hasil dari kesepakatan tersebut pihak Inggris mengakui bahwa Pattani dengan tiga Propinsi Melayu yang lain (Yala, Narathivat dan Satun) secara definitif menjadi bagian dari kerajaan Thai.

Keempat propinsi tersebut berada dalam satu pengawasan mounthoun Pattani. Secara resmi propinsi Melayu yang dulunya merupakan wilayah Pattani Raya kemudian menjadi bagian integral kerajaan Thai. Dengan terjadinya dua peristiwa tersebut yaitu diterapkannya sistem administrasi propinsi dan disepakatinya perjanjian Thai, bangsa Pattani mulai memasuki suatu unit politik yang sama sekali berbeda. Sejak terbentuknya satuan administrasi baru tersebut otonomi budaya orang Melayu Muslim mulai terancam. Pemerintah Kerajaan Thai mulai melakukan berbagai program pembaruan yang bertujuan untuk menggantikan identitas agama dan cultural orang Melayu Muslim dengan Budhaisme.

Lahirnya gerakan kemerdekaan Pattani di Thailand Selatan berawal sejak masyarakat Melayu-Muslim terintegrasi dalam negara Thai. Mereka sangat menentang kebijakan asimilasi yang diterapkan pemerintah Thai. Bentuk perlawanan bersifat pasif sedangkan ledakan kekerasan hanya terjadi apabila kondisi sangat memburuk bagi eksistensi identitas mereka. Pada awalnya pimpinan pemberontakan terdiri dari kaum ulama dan keturunan bangsawan. Namun sejak decade 1970-an, terjadi perubahan pola dan aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Aktor yang memimpin gerakan adalah tersebut lebih agresif dan canggih dalam mengorganisasikan dan menyusun strategi pergerakan.⁴⁰

⁴⁰ *Mengunjungi Pattani, Jantung Komunitas Muslim Melayu Di Thailand Sedang Bergolak* Indonesia Irib. Ir/ index. Php?option = com_content & task = view & id= 1925 diakses tgl 4 Juni 2008 .

Sejarawan dari Barat Muhammad Ali, Kandidat doktor sejarah *University of Hawaii at Manoa*, Amerika menguraikan secara garis besar sejarah perjuangan nasionalisme Muslim Patani dibagi menjadi tiga periode: masa Raja Rama I (1785-1867), pembangunan sistem birokrasi Raja Rama V (1868-1931), dan perubahan monarki absolut kepada monarki konstitusional (1932-sekarang). Bahwa perubahan monarki absolut kepada monarki konstitusional 1932 atau dinamakan 'Revolusi Siam' tidak ada perubahan bagi Melayu Patani apa yang diinginkan, orang Melayu di wilayah Patani terus hidup dalam keadaan tertekan dan terus menderita ⁴¹. Pemerintah Inggris juga pernah mendesak Pemerintah Thailand di Bangkok untuk menghentikan ketidakadilan di provinsi-provinsi Selatan Thailand itu. Namun, solusi-solusi yang diupayakan Bangkok tidak cukup berhasil.

Masyarakat Thailand selatan yang mayoritas Muslim sejak lama merasa dikucilkan oleh Bangkok. Mereka mengeluh kurangnya perhatian dari pemerintah, perilaku diskriminatif dan minimnya peluang pendidikan dan karier yang mereka peroleh. Penduduk Muslim yang jumlahnya sekitar enam juta jiwa terkonsentrasi di empat provinsi: Narathiwat, Pattani, Songhkla dan Yala. Umumnya daerah-daerah ini tidak semakmur Thailand tengah. Secara fisik penduduk selatan memiliki raut yang lebih mirip orang Melayu.

Dalam sejarah, provinsi-provinsi selatan ini merupakan bagian dari Kerajaan Pattani, sebuah wilayah Melayu yang semi otonom dan mengadopsi

⁴¹*Thailand Selatan Dalam Geostrateg*, Kompas 04 Desember 2007; lihat <http://www.kompas.com>

Islam sejak pertengahan abad ke-13. Pada tahun 1902 daerah itu dianeksasi Kerajaan Thailand. Bahwa penduduk yang hidup di selatan memiliki banyak kesamaan adat dan kebiasaan dengan tetangganya, Malaysia. Mereka berbicara bahasa Yawi, sebuah dialek Melayu, dan menganut agama Islam.

Di negeri ini, berdiri sebuah mesjid yang menjadi lambang Islam, yaitu Masjid Pintu Gerbang atau disebut juga Masjid Kerisek. Masjid ini berada di depan pintu gerbang Istana Negara dengan lebar 15,10 meter, panjang 29,60 meter dan tinggi 6,5 meter. Tentara Thailand pernah membakar mesjid bersejarah ini sebanyak tiga kali, namun hingga sekarang masih bisa bertahan. Masjid Pintu Gerbang ini menjadi penghulu mesjid-mesjid lainnya di Thailand selatan yang jumlahnya sekitar 1.395 (tahun 1987).

Pada tahun 1935 mesjid Pintu Gerbang diangkat menjadi situs negara dan dilarang untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Tentu saja umat Islam tidak mau menerima keputusan pemerintah tersebut. Berbagai upaya terus dilakukan, hingga demonstrasi besar-besaran pada tahun 1988 menuntut agar mesjid lambang umat Islam tersebut diizinkan dijadikan tempat ibadah kembali. Hasilnya, pemerintah memutuskan bahwa mesjid tersebut tetap menjadi situs negara, tetapi boleh dijadikan sebagai tempat ibadah.

Mesjid lain yang menjadi syiar Islam di Thailand adalah Masjid Shalahudin Al Ayubi dan Masjid Kulusei. Masjid Shalahudin Al Ayubi adalah sebuah mesjid yang terletak di Nahofi. Arsitektur bangunan mesjid ini memiliki kesamaan

dengan masjid Madinah dengan dihiasi menara setinggi kira-kira 25 meter. Nama Shalahudin Al Ayubi diambil untuk mengenang kemenangan beliau sebagai panglima Islam dalam Perang Salib pada abad ke-12 M.

Sedangkan Masjid Kulusei adalah sebuah masjid yang menyimpan legenda. Masjid ini hingga sekarang pembangunannya tidak rampung, disebabkan adanya persengketaan antar keluarga dan antar suku yang cukup serius. Pada abad ke-16 M, masjid ini dibangun oleh seorang China Budha yang kemudian masuk Islam. Sebelum masuk Islam, ia pernah bernazar bahwa jika dirinya masuk Islam, maka ia akan membangun sebuah masjid. Akhirnya, ia menjadi seorang muslim yang war dan mulai membangun masjid yang dinamikannya. Akan tetapi, seorang adik perempuannya yang masih beragama Budha, sangat tidak senang melihat perubahan pada diri kakaknya. Sang adik kemudian melakukan berbagai macam cara untuk menggagalkan rencana kakaknya. Hingga kemudian persetujuan adik-kakak tersebut berkembang menjadi persetujuan suku. Orang-orang China Budha di daerah tersebut berencana bakar, sehingga merusak dan menghancurkan masjid tersebut. Hingga kini masjid Kulusei tinggal dinding-dinding rapuh tanpa atap.

Perlu diketahui bahwa masyarakat Papua tergolong masyarakat kerdil, walau dalam tekanan politik dan diskriminasi, tetapi mereka terus gigit melakukan berbagai eksperimen di bidang pertanian dan peternakan, sehingga keturunan mereka cukup makmur walau dana yang diberi pemerintah hanya

sedikit. Kreativitas itulah yang membuat komunitas muslim tersebut tetap sejahtera secara ekonomi walau secara politik dan sosial didiskriminasi. Tetapi celakanya kelompok lain yang ada dalam negeri itu bukan dianggap sebagai kekayaan kultural, yang kemudian dijaga dan dikembangkan, serta dilibatkan dalam berbagai aktivitas masyarakat dan kenegaraan di negeri yang telah berdemokrasi itu. Bila kenyataan seperti itu demokrasi hanya untuk bangsa Thai Budha, belum untuk bangsa secara keseluruhan. Sebaliknya mereka malah dianggap duri dalam daging, yang kalau dapat harus dienyahkan. Kalau dilihat tingginya frekwensi kekerasan yang dilakukan pemerintah pada bangsa Pattani, maka nafsu untuk penenyapan itu sungguh terjadi. Umat Muslim Pattani tidak berdiam diri. Mereka senantiasa berupaya untuk mandiri, terutama untuk mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi.

Demikian pula di bidang pendidikan agama. Bahwa Pondok Patani, atau pondok di Thailand Selatan secara keseluruhan boleh dikatakan sama dengan pesantren di Jawa atau tempat-tempat lain di Indonesia pada 1950-an atau 1960-an sebelum pesantren mengalami modernisasi. Pondok Patani, umumnya masih sangat tradisional, bagi kaum Melayu Muslim Thailand Selatan lebih daripada sekadar lembaga pendidikan Islam, tapi juga merupakan salah satu identitas keagamaan dan kultural.

Pesantren yang terdapat di Thailand bertumpu di Selatan Thailand, khususnya Pattani, Yala dan Narathiwat. Yang paling banyak di Pattani. Disana di



sebut pondok. Namun pondok ini berfungsi sebagai insitisi pengajian agama tradisional. Bahwa di Selatan Thailand terutama Pattani adalah pusat kegemilangan tamadun Islam dimana disana terletak pusat-pusat pengajian Islam terkenal.

Menurut Azyumardi Azra bahwa tradisionalisme pondok Patani mempunyai sejarah panjang. Kaum Muslimin Melayu Patani mengklaim, pondok merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di nusantara, meski sumber-sumber sejarah umumnya menyebutkan, Islam datang dan berkembang di wilayah ini baru pada abad ke-16. Terlepas dari kondisi itu, pondok Patani mengirimkan lulusan terbaiknya ke Haramayn yang kemudian menjadi ulama besar seperti Daud bin Abdullah al-Patani (abad ke-19), Ahmad bin Muahammad Zayn al-Patani, dan Zayn al-Abidin bin Muhammad al-Patani (abad 20). Mereka juga punya pondok sebagai asas untuk memainkan peranan sebagai pendakwah dalam menyebarkan syiar islam sendiri.

Di Thailand tokoh-tokoh terkenal dalam bidang agama biasanya mereka punya pesanteren tersendiri. Sekolah agama tersendiri, Haji Sulong juga pengasas sekolah agama atau madrasah dalam bentuk pengajian agama. Beliau juga pengasas sekolah pondok, selain daripada tokoh yang lain.

Haji Sulong telah mendirikan Madrasah al-Mu'aruf al-Wataniah. *Bagaimanapun madrasah ini tidak dapat bertahan lama setelah diperintah tutup oleh pihak berkuasa Siam. Dengan penutupan madrasah tersebut, Haji Sulong mulai mengajar di Masjid Pattani dalam bidang ilmu Usuluddin dan Tafsir.*

Huraian-huraian beliau dalam tafsir adalah sesuatu yang baru bagi masyarakat Patani yang biasa mendengar tafsiran cara Baidhawi dan cara lain saja. Tafsir beliau dikatakan sangat menarik, progresif dan berani sehingga menyebabkan orang ramai tertarik untuk menghadiri kuliah-kuliahnya.

Pendidikan nasional di wilayah selatan Thailand dilakukan menurut pola pikir pusat, yaitu dengan memasukkan sistem pendidikan 'Barat' dengan tujuan modernisasi dan pendidikan budaya mayoritas Thailand, termasuk ajaran Buddha. Sementara sejak lama orang Melayu telah memiliki sistem dan budaya pendidikan pondok yang menekankan pentingnya agama Islam, budaya Melayu, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu tradisional lainnya. Meskipun pemerintah Thailand cukup sensitif dalam kebijakan pendidikan di wilayah selatan, pendidikan masih dipaksakan dengan bahasa Thailand oleh biksu-biksu Buddha dengan ajaran Buddha sebagai isinya.

Pada saat-saat tertentu anak-anak sekolah pun harus menyanyikan lagu-lagu bernafaskan Budha dan kepada guru harus menyembah dengan sembah Budha. Kementrian Pendidikan memutar balik sejarah (fakta) : dikatakannya bahwa orang Islam itulah yang jahat ingin menentang pemerintahan shah di Siam dan menjatuhkan raja. Dengan ini, bagi mereka yang memilih mengikuti jalur pendidikan modern, ada kekhawatiran akan menjadi terasing dari kondisi sosial masyarakat sendiri. Di tengah belantara yang mirip anarki tersebut, satu-satunya benteng pertahanan rakyat adalah berlindung di bawah payung afiliasi etnis, yakni identitas Melayu dan Islam. Maka, tidak heran, pondok pesantren tetap menjadi

favorit orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Sementara sekolah modern yang sekuler dilihat sebagai representasi Pemerintah Thailand. Kehadirannya dianggap sebagai ancaman terhadap bangsa Melayu dan Islam.

Walau demikian, pemerintah Thailand tetap berusaha untuk dapat menggabungkan pendidikan modern dan agama ke dalam satu wadah. Sementara beberapa wilayah Muslim, masih mempertahankan keberadaan pondok pesantren tradisional yang terlepas dari pemerintah. Di Pattani misalnya, ada sekitar 295 pondok dan 93 diantaranya tetap mempertahankan sistem pendidikan tradisional. Kini tentu saja ditemui, semakin banyak anak-anak muda Melayu di wilayah selatan Thailand mengenyam pendidikan nasional Thailand, belajar bahasa Thailand, di samping menggunakan bahasa Melayu mereka. Sebagian mereka juga menikmati mobilisasi vertikal karena pendidikan mereka itu. Namun, tidak semua, dan masih sebagian besar warga Melayu di selatan, berkeberatan dengan program Siamisasi atau Thailandisasi Melayu.

Bagi orang-orang Islam tidak diperbolehkan mempunyai partai politik yang berasas Islam bahkan segala organisasi pun harus berasaskan: 'Kebang-saan'. Pemerintah pun membentuk semacam pangkat mufti yang dinamakan Culamantri, biasanya yang diangkat itu seorang alim yang dapat menjilat dan dapat memutar balik ayat sehingga ia memfatwakan haram melawan kekuasaan Budha.

Pada saat-saat tertentu Pemerintah Bangkok mempamerkan pula segala persenjataan berat, alat-alat militer, Akatan Darat, Akatan Laut, maupun Akatan Udara. Lalu mereka mengundang ulama Islam, Majlis Agama Islam Wilayah,

Ustaz-ustaz, dan aktivis-aktivis Islam untuk melihat-lihat, dengan harapan akan tumbuh rasa takut dengan mempunyai kekuatan oleh kerajaan untuk rasa ingin memberontak.

Kini, setelah kerusuhan kembali merebak di Patani atau kawasan Melayu Muslim di Thailand Selatan dalam dekade terakhir ini, pondok menjadi tertuduh sebagai tempat pusat perlawanan atas pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah. Kerajaan Thailand, secara terbuka menyatakan tidak akan menoleransi pondok seperti itu. Karena itu, ancaman penutupan pondok, langsung ataupun tidak, bagi kaum Muslimin Selatan merupakan 'pembunuhan', genocide, religius-kultural pada agama, bangsa, dan pada umat Melayu Patani dewasa ini.

Demikian pula dalam mengekspresikan bahasa perjuangan, mereka berbicara "dalam bahasa yang sama" dengan bahasa politik Pemerintah Thai. Bagaimana tuntutan dan proses didasarkan atas asas-asas yang diserukan pemerintah Thai, yaitu kebebasan persamaan, dan jaminan hak-hak politik bagi semua warga negara tanpa memandang asal-asul rasa dan etnik.

Selain berjuang di dalam negeri, masalah etnik Melayu-Muslim di Thailand Selatan sangat gencar diperjuangkan dalam diplomasi Internasional. Para intelektual muda tersebut mempunyai wakil-wakil dalam pertemuan-pertemuan Internasional. seperti Konferensi Liga Duma Islam, Konferensi Para Menteri Luar Negeri Islam, Konferensi Islam Asia, dan Konferensi Liga Arab.

Begitu pula dengan esensi tuntutan yang diperjuangkan, bila sebelumnya terbatasnya pada otonomi dalam urusan keagamaan, kebudayaan dan hukum,

namun mulai pertengahan 1970-an tuntutananya berkembang, yaitu keinginan untuk membentuk suatu pemerintahan yang otonom. Dalam memperjuangkan cita-cita ini, etnik Pattani melakukan pergerakan-pergerakan terutama salah satunya dengan pemberontakan untuk memisahkan diri dari kerajaan Thailand.

B. Substansi Gerakan Separatis Pattani

1. Aktor Kunci Gerakan Separatis Pattani

Strategis dan aktor kunci yang digunakan etnik Pattani serta bentuk-bentuk gerakan ancaman oleh bentuk etnis Pattani dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

Dalam memperjuangkan cita-cita dan etnik Pattani, pergerakan mereka dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok utama yang didasarkan pada ideologi, struktur kepemimpinan dan keanggotaan, yaitu :

1. National Liberation Front of Pattani (NLFP)

National Liberation Front of Pattani (NLFP), merupakan organisasi separatis paling tua diantara organisasi separatis yang lain.

Tengku Mahyidin-putra Abdul Kadir, sejak 1977.

- a Didirikan oleh Tengku Mahyidin-putra Abdul Kadir
- b Aspirasi utama organisasi ini adalah "Organisasi Pattani dalam Federasi Malaysia".
- c. NLPP memelihara hubungan yang erat dengan unsur-unsur konservatif yaitu kelompok utama dan bangsawan Pattani.

2. Barisan Revolusi Nasional (BRN)

Organisasi berorientasi republik namun cenderung ke arah sosialisme Islam ini mempunyai tujuan mencetuskan suatu revolusi sosial dan membebaskan daerah Pattani Raya melalui jalan kekerasan. BRN, pada tanggal 7 Agustus 1977 membentuk "Tentara pembebasan Rakyat Muslim" untuk bertempur secara bergerilya melawan pemerintah Thailand bersama pasukan gerilya Partai Komunis Thai. BRN telah mengubah persoalan regional yang hanya melibatkan pemerintah Thai dan minoritas Melayu menjadi sebuah konflik ideologi yang dapat melibatkan negara-negara asing (Partai Komunis Cina dan Partai Komunis Vietnam).

3. *Pattani United Liberation Organization (PULO)*

PULO/PPPP merupakan kelompok gerilya paling efektif dan paling baik organisasinya. Dibentuk pada tahun 1968 dan menjadi organisasi induk yang mengkoordinasikan banyak kelompok gerilya. Struktur organisasi PULO terdiri dari tiga tingkat pimpinan. Tingkat pimpinan pertama menentukan kebijakan, berlokasi di Makkah, Arab Saudi. Tingkat pimpinan kedua bertanggung jawab atas urusan politik, berada di Tumpat, Kelantan (Malaysia). Tingkat pimpinan ketiga adalah pimpinan operasi militer. Oleh karena itu, Pulo merupakan organisasi pembebasan yang memiliki pasukan militer yang paling terlatih dan paling baik perlengkapannya di antara kelompok separatis lainnya.

Pasukan bersenjata PULO aktif di keempat provinsi Melayu-Muslim dan di beberapa diskrit di provinsi Songkla. PULO memiliki jaringan yang sangat luas di seluruh dunia. Disamping berbagai kegiatan militer, PULO juga mengutamakan kampanye politik untuk mempertajam perpecahan antara mayoritas Melayu-Muslim dan minoritas China Budhis di provinsi-provinsi perbatasan.

- a. Tokohnya adalah Kubira Kotanila dan Harun Muleng dari organisasi pemuda tahun 70-an.
- b. Memiliki landasan idiologi yang dikenal dengan istilah "UBANG TAPAKEMA" (Agama, bangsa, tanah air dan perikemanusiaan).
- c. Basis pendukungnya lebih luas.
- d. Struktur organisasinya terdiri dari 3 tingkat

Pada tahun 1975 PULO berhasil memobilisasi 70.000 orang untuk turun ke jalan untuk melakukan serangkaian demonstrasi menurut pemerintah yang otonom.

2. Bentuk-bentuk Perlawanan Gerakan Separatis Pattani

Dalam masyarakat Melayu-Muslim di Thailand Selatan bentuk gerakan-gerakan fundamentalisme diantaranya sebagai berikut :

- a. Gerakan Dakwah
- b. Gerakan Rariqah
- c. Kelompok-kelompok muslim militant.

Bentuk perlawanan bersifat pasif sedangkan ledakan terjadi apabila kondisi sangat memburuk bagi eksistensi identitas mereka. Sejak decade 70-an aktor yang memimpin adalah generasi mudah yang memiliki bekal akademis yang agresif dan canggih dalam mengorganisasikan dan menyusun strategi pergerakan. Selain berjuang dalam negeri dalam diplomasi Internasional masalah etnik Melayu-Muslim Thailand Selatan mulai digerakkan dan mempunyai wakil-wakil dalam pertemuan-pertemuan Internasional seperti Konferensi Liga Dunia, Konferensi Para Menteri Luar Negeri Islam, Konferensi Islam Asia dan Konferensi Liga Arab.

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pemberontakan Etnis Pattani

a. Faktor-faktor sosial meliputi :

1. Terancamnya otonomi budaya etnik Melayu-Muslim sejak terbentuknya sistem administrasi provinsi dan terpusat serta disepakatinya perjanjian pembatasan antara wilayah jajahan Inggris di semenanjung Malaya dan kerajaan Thai. Perbedaan yang mencolok antara Melayu Muslim di Selatan dan Buddha-Thai di seluruh wilayah Thailand tidak hanya pada keragaman etnisitasnya, tetapi lebih pada agamanya. Muslim di Selatan Thailand dan Buddha dianut hamper diseluruh Thailand.
2. Kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Thai.

3. Sekularisasi pokok dengan di berlakunya konsep pendidikan sekuler.
 4. Mempertahankan identitas cultur yang dianggap keramat yaitu fundamentalisme Islam yang diletakkan sebagai identitas Melayu-Muslim ras, bahasa, adat istiadat, dan kesadaran suatu identitas sendiri) dari upaya mengintegrasikan dan program asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah Thai.
- b. Faktor-faktor politik meliputi :
1. Mendapat dukungan Internasional

Meliputi NLFP (*National Liberation Front of Pattani*) organisasi yang pusatnya di Mekah-Arab Saudi yang berfungsi mengkoordinasi kegiatannya diberbagai negara, serta melakukan loby Internasional diberbagai pertemuan negara-negara Islam sebagai saran efektif untuk menekan pemerintahan Thailand. Bahkan pada tahun 1975 organisasi PULO (*Pattani United Liberation Organization*) berhasil memobilisasi 70.000 orang Melayu-Muslim untuk demonstrasi politik sehingga aksi ini mampu menarik perhatian pres dunia, sehingga dukungan Internasional bertambah besar.
 2. Keinginan untuk mendapatkan otonomi dalam keagamaan. Kebudayaan. Hukum, serta membentuk pemerintahan yang otonom.
 3. Dominasi elit politik oleh etnis Thai terhadap etnik Melayu-Muslim dalam pemerintahan nasional dan lokal.

4. Penyeragaman sistem hukum, pembangunan, struktur pada institusi pengadilan dan penterjemahan hukum Islam dari bahasa Arab ke dalam bahasa Thai.
5. Penguatan pilar-pilar idiologi "Bangsa, Agama, dan Raja" melalui perlunya kekuasaan absolut pemerintah Thai guna menanamkan persatuan bangsa Thai.

c. Faktor-faktor ekonomi

Disparitas ekonomi antara pusat dan provinsi di pinggiran menimbulkan tumbuhnya semangat 'separatisme' atau 'separatisme etnis' yang terjadi di Selatan, Utara dan Timur Laut. Masing-masing melibatkan melayu Muslim di Selatan, etnis perbukitan di Utara, dan orang Islam di Timur Laut. Identitas Muslim Melayu di Selatan, masyarakat komunis di Utara secara jelas berbeda dengan mayoritas Thai-Buddha, sedangkan di Timur Laut hanya berbeda etnis, yaitu kelompok Laos-Thai, meskipun agama sama. Disparitas ini memang sangat mencolok, pada tahun 1983, jauh sebelum krisis moneter yang bermula di Thailand, Kota Metropolitan Bangkok memiliki pendapatan per kapita, 51.441 bath, sementara di bagian Selatan, 16.148 bath, tiga kali lipat lebih rendah dibandingkan Bangkok, sementara di bagian Utara, 12.441 bath dan wilayah Timur Laut, 7.146 bath. Disparitas ini menimbulkan kekecewaan, kecemburuan dan rasa tidak adil yang kemudian berakibat pada keinginan masyarakat untuk mengatur

mereka sendiri (*otonomi*, dan *merdeka*). Dua puluh empat tahun kemudian, kesenjangan inipun semakin lebar, karena pemerintah menaruh curiga atas tumbuhnya kekuatan masyarakat di wilayah ini, dan pembangunan tidak diprioritaskan. Propinsi Thailand selatan tergolong propinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tergolong propinsi paling makmur, namun penduduk di Thailand Selatan dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin, jika dibandingkan dengan Thailand Tengah, apalagi jika dibandingkan dengan Metropolitan Bangkok.

Secara umum dapat digambarkan bahwa dengan upaya-upaya pemerintahan Thai dalam melaksanakan kebijakan asimilasinya, baik itu berupa diskriminasi akomodasi elit politik terhadap etnis Pattani, melalui berbagai strategi pemerintah lain, memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesejahteraan ekonomi etnis Pattani. Hal ini menyebabkan serangkaian pemberontakan atau pergerakan-pergerakan etnis Pattani untuk mendapatkan hak-hak yang dirasakan oleh mereka yang telah dirampas oleh pemerintah Thai.

Secara garis besar terdapat 3 bidang yang menjadi sasaran pemerintah Bangkok dalam menjalankan kebijakan asimilasi, yaitu :

1. Di bidang hukum strategi yang ditempuh pemerintah menerapkan hukum kerajaan sebagai landasan hukum masyarakat Pattani, perombakan struktur pengadilan, serta penerjemahan dan hukum Islam agar tercipta *keadilan* dan konsistensi dalam penerapannya.

- 
2. Di sektor pendidikan yaitu dengan melarang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk diganti dengan bahasa Thai, mengharuskan pondok menerapkan pendidikan sekuler/sebagai sekolah swasta untuk pendidikan Islam.
 3. Di bidang budaya adalah diciptakannya konsep kebudayaan Thai Rahnium atau mandat kebudayaan Wiraihan yang merupakan perundang-undangan nasional mengenai keberanian rakyat Thai.

C. Konflik Antara Gerakan Separatis Pattani Dengan Pemerintah Thailand

Memahami begitu kompleksnya akar masalah di Thailand Selatan, adalah curang tepat menganggap bangkit di Patani sebagai konflik agama antara Islam dan Buddha. Konflik di wilayah Selatan Thailand menunjukkan tidak lancarnya program pembangunan nasional, termasuk pendidikan nasional, kebijakan struktur politik, dan kebijakan ekonomi-sosial, dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan. Nasionalisme negara tidak selalu berhasil ketika kesenjangan struktural dan kultural tidak ditangani secara bersama-sama dan secara serius.

Penyebab warga Muslim ini terpisah dari warga Thailand lainnya bukan hanya kepercayaan agama mereka. Warga Muslim di lima provinsi di Selatan Thailand, yaitu Narathiwat, Patani, Satun, Songkhla, dan Yala, mempunyai sejarahnya sendiri. Lebih dari satu abad lalu mereka tergabung dalam kerajaan Patani yang pada tahun 1902 dikuasai oleh Siam atau Thailand termasuk harus setia dan menghormati Raja

Kerajaan Siam, berbicara bahasa Thailand, dan bahkan menggunakan nama Thailand. Warga Muslim dipaksa untuk menerima semua ketentuan itu

Mengingat kebijakan semacam itu yang dijalankan oleh pemerintahan pusat, tidak mengherankan bila pemimpin tanpa kekuatan perlawanan Patani. Namun, hal itu ditambah dengan pendekatan persoalan yang tidak mau mengerti budaya dan aspirasi warga setempat. Muslim selatan itu tidak mau menghilangkan identitas mereka, yang di sisi lain justru dipandang pemerintah pusat penting demi sebuah Thailand yang utuh. Orang Siam mencoba sekuat tenaga untuk menyingkirkan agama Islam dari negeri ini, mencoba memaksa orang Melayu untuk menyembah Buddha.

Mereka memerintah orang Melayu berpakaian seperti orang Siam laki-laki mengenakan celana panjang, dan tidak peduli Haji atau Lebai, harus mengenakan topi helm atau topi Eropa untuk mengganti turban; sedangkan perempuan harus mengenakan rok atau gaun. Orang yang mengabaikan perturan-peraturan ini dihukum dengan cara bermacam-macam; mereka dihina dengan sepakan-sepakan kaki, dan sebagainya, perempuan dipaksa menanggalkan pakaian Melayunya dan dilarang melaporkan kepada pihak berwenang untuk mendapat keadilan tetapi harus berpakaian seperti diperintahkan. Hanya ciri-ciri kebudayaan rakyat Thai di daerah pusat sajalah yang akan diizinkan dan bahkan dikembangkan. Golongan-golongan minoritas harus tunduk kepada norma-norma Thai. Nama negara itu diubah dari nama Siam diubah menjadi "Negeri Thai" (Thailand dengan tekanan pada Thai).

Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk memberikan gambaran sejarah konflik antara kerajaan Pattani dengan Pemerintah Thailand untuk memudahkan dalam memahami sejarah dan perjuangannya. Penulis akan mengatakannya secara singkat melalui beberapa periode waktu.

Periode 1912-1922

Sejak pemerintah Thailand memasukkan daerah Pattani Raya ke dalam negara Thai pada tahun 1912, resistensi berujung kami terjadi protes dan pemberontakan melawan kekuasaan pemerintah Thailand. Faktor utama yang resisten menentang mendukung separatisme Melayu-Muslim Pattani Raya adalah etnisitas dan solidaritas kebangsaan. kedua faktor ini juga membedakan mereka dari bagian utama penduduk Thailand. Islam dan etnisitas Melayu digunakan untuk memobilisasi rakyat minoritas menentang campur tangan pemerintah dalam unsur masyarakat Melayu-Muslim di Thailand Selatan.

Kelompok Melayu-Muslim di empat provinsi di Thailand Selatan memiliki sejarah panjang sebagai daerah merdeka atau taklukan. Proses memasukkan provinsi-provinsi paling selatan itu ke dalam kerajaan Thai (Thailand), merupakan suatu proses yang lambat dan sulit. Pada pertengahan abad ke-19, Pattani merupakan kerajaan Melayu-Muslim terbesar di Selatan telah menjadi pokok sengketa antara Inggris dan para pemimpin Thai di Bangkok sehingga kerajaan Thai terpaksa mengadakan pembaruan administratif atas

pertimbangan keamanan nasional dan efisiensi dalam urusan negara. Setelah pembaruan 1902 itu, dimulailah gerakan menentang kekuasaan Thai.

Reaksi kolektif pertama atas program pembaruan di daerah Pattani terjadi pada tahun 1903, satu tahun setelah dimulainya pembaruan. Gerakan itu di koordinasi oleh Raja Pattani, Abdul Kadir, yang menempuh sebuah strategi bercabang dua, yaitu perlawanan umum untuk memancing tindakan-tindakan penindasan yang lebih keras dari pihak penguasa sehingga akan mencetuskan pemberontakan hebat terhadap sistem baru itu, dan berusaha untuk minta campur tangan asing, terutama dari Inggris. Dalam periode ini, pemberontakan Namsai yang berlangsung pada tahun 1922 menjadi peristiwa penting bagi perjuangan kemerdekaan Pattani Raya di mana anggota-anggota kerabat raja bersama para pemuka agama bentrok dengan para pejabat Buddhis di sebuah daerah pemukiman pedesaan Pattani. Banyak korban yang jatuh sebelum pemberontakan itu dapat dipadamkan.

Periode 1922-1945

Adanya keinginan Raja Chulalongkom untuk mengintegrasikan daerah Melayu-Muslim ke dalam sistem administratif Thai, memutuskan bahwa suatu pemerintahan tidak langsung tidak praktis lagi untuk dijalankan. Birokrasi pusat ternyata harus lebih diperluas di mana tingkat kekuasaan harus dialihkan ke tangan para pejabat yang diangkat oleh Bangkok. Tahun 1906, selang empat tahun setelah pencopotan raja-raja Melayu dari kekuasaan atas daerah-daerah

kerajaan Melayu-Muslim melakukan penggabungan daerah itu dalam suatu *Monthon* (satuan administratif daerah) baru dengan nama *Monthon Pattani*.

Upaya mempersatukan kerajaan terus dilakukan meski telah terjadi peralihan kekuasaan dari Raja Chulalongkorn kepada anaknya, Raja Wachiravut atau Rama VI melalui nasionalisme satu bangsa, yaitu bangsa Thai. Doktrin nasionalisme Raja Wachiravut ditujukan untuk golongan-golongan minoritas yang berada dalam kekuasaan kerajaan Thai. Implementasi dari doktrin nasionalisme itu dilakukan melalui program wajib mengikuti pendidikan Thai yang telah dimulai di masa pemerintahan ayahnya dan mulai memperlihatkan hasil pengaruhnya terhadap masyarakat tradisional Melayu. Madrasah-madrasah yang diselenggarakan di masjid-masjid didorong untuk mengubah kurikulumnya sehingga mencakup pelajaran bahasa dan indoktrinasi kewargaan Thai yang telah dirancang oleh Bangkok. Namun, persoalan paling meresahkan masyarakat adalah semakin besarnya pengawasan Thai atas segala dimensi kehidupan sehari-hari.

Sejak awal, perlawanan terhadap kekuasaan Thai mengambil bentuk pemberontakan-pemberontakan keagamaan yang berusaha menghalau kekuasaan politik asing dari daerah itu. Pemberontakan besar di bawah pimpinan beberapa ulama dan bangsawan Melayu yang telah kehilangan kekuasaan, meletus pada tahun 1922. Pemberontakan itu disemangati oleh bekas raja Pattani, Abdul Kadir, yang memperoleh simpati dan dukungan materiil dari kaum bangsawan dan kaum ulama Melayu di Kelantan. Raja Abdul Kadir mendapat simpati dari kedua

golongan itu karena ia dapat meyakinkan raja-raja Melayu dengan alasan bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk membebaskan sesama Melayu yang sedang ditindas di seberang perbatasan. Kepada para ulama ia mengingatkan akan kewajiban untuk membebaskan sesama muslim dari kekuasaan Thai-Buddhis. Dengan demikian, bergabunglah sentimen keagamaan dan aspirasi politik dari lintas perbatasan untuk melancarkan suatu gerakan pembebasan rakyat Pattani Raya untuk pertama kalinya yang mencakup seluruh daerah itu. Dukungan dan simpati yang telah berhasil ia kerahkan dalam tahun 1922, sudah cukup untuk menghentikan kampanye pemerintah Thai (Thailand) untuk men-Thai-kan propinsi-propinsi di bagian selatan negara itu.

Bangkitnya kesadaran nasionalisme Melayu di kalangan rakyat negeri-negeri bagian utara Malaya (kini Malaysia) dan kesediaan mereka untuk memberi dukungan materiil dan politik kepada sesama Melayu di bawah penindasan kekuasaan Thai, menyadarkan para pejabat Thai bahwa penindasan identitas etnik dan kebudayaan hanya akan memancing reaksi-reaksi kekerasan. Pendekatan yang lebih baik adalah dengan membina loyalitas politik, melegitimasi kekuasaan melalui partisipasi dan perwakilan dan usaha-usaha yang terus menerus untuk mengembangkan perekonomian. Cara pendekatan itu ditempuh dalam tahun 1932, ketika negara Thailand mengalami suatu transformasi konstitusi yang mengakhiri monarki absolut dan melahirkan suatu bentuk pemerintahan representatif.

Peristiwa penting dalam periode ini adalah diberlakukannya Undang-Undang Patronase Islam 1945, yang bertujuan untuk memasukkan pimpinan agama ke dalam wewenang pemerintah. Akibatnya, para ulama mengambil alih pimpinan dan untuk kesekian kalinya membangkitkan orang-orang Melayu-Muslim yang berorientasi kepada tradisi untuk bersatu menentang kebijakan asimilasionis pemerintah yang dikenal dengan sebutan Peraturan Kebudayaan (*Kot Wattanatham*) di bawah rezim Pihak Sekutu.

Periode 1945-1957

Dalam periode ini, pemerintah Thai (*Thailand*) dengan tujuan untuk berusaha mengkonsolidasikan kekuasaannya atas wilayah-wilayah yang dikuasainya di kalangan Melayu-Muslim. Pemerintah Thai dalam rangka itu telah melakukan beberapa langkah-langkah yang dapat dikategorikan sebagai upaya-upaya untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain: 1. Mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah setempat. 2. Mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah setempat. 3. Mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah setempat. 4. Mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah setempat. 5. Mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah setempat. 6. Mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah setempat. 7. Mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah setempat. 8. Mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah setempat. 9. Mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah setempat. 10. Mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah setempat.



April 1948. Adanya kecurigaan mendalam dan pengalaman getir orang-orang Melayu-Muslim akibat kebijakan asimilasi paksaan sebelum dan di masa Perang Dunia II, secara otomatis mencetuskan pemberontakan-pemberontakan yang hampir spontan di daerah Selatan Thai. Bentrok kekerasan dengan polisi dan pasukan keamanan terjadi di empat propinsi di Thailand Selatan yang mengakibatkan ratusan orang terbunuh dan ribuan lainnya mengungsi ke Malaya (Malaysia). Bentrokan paling hebat terjadi di sebuah kampung bernama Dusong Nyor di propinsi Narathiwat yang dipimpin oleh Haji Abdul Rahman, memimpin lebih dari seribu orang menghadapi pasukan pemerintah dalam suatu pertempuran terbuka sehingga mengakibatkan seratus orang tewas dipihak orang Melayu. Pemberontakan Dusong Nyor yang terjadi pada tanggal 26-27 April itu hingga sekarang merupakan lambang semangat perlawanan Melayu dan masih terus mengilhami gerakan-gerakan kemerdekaan hingga kini.

Sementara itu, tekanan internasional bertambah besar dan peristiwa Haji Sulong menyebabkan masalah Pattani mendapat perhatian Liga Arab dan PBB. Tapi, yang paling ampuh dari semua koalisi internasional yang terbentuk untuk mendukung perjuangan Melayu-Muslim itu adalah *Gabongan Melayu Pattani Raya* (GAMPAR) yang terbentuk dalam bulan Februari 1944. GAMPAR menjadi sebuah organisasi yang mengkoordinasikan berbagai unsur yang bekerja untuk pembebasan Pattani Raya. Organisasi ini memperoleh dukungan dari berbagai golongan dan partai politik di Malaya. GAMPAR juga berhasil menarik dukungan pimpinan *Malay Nationalist Party* (MNP, atau Partai Nasionalis

Melayu) yang bercita-citakan penyatuan semua rakyat Melayu ke dalam Indonesia Raya. Tengku Muhyiddin, yang mengkoordinasikan bagian terbesar upaya internasional untuk meredakan ketegangan di Thailand Selatan.

Kematian Haji Sulong menandai berakhirnya pemberontakan umum yang dipimpin oleh para ulama. Kematian misterius Haji Sulong dan anak laki-laknya, Ahmad To' mina tahun 1954 adalah merupakan suatu pengakuan kegagalan di pihak pemerintah, bahwa mereka tidak mampu mengintegrasikan golongan minoritas paling besar ke dalam negara Thai, sebagaimana yang dilakukannya pada golongan etnik di daerah lainnya. Kekuatan pengikat yang diberikan Islam kepada golongan Melayu-Muslim di Pattani Raya telah berfungsi untuk menciptakan apa yang oleh Ibn Khaldun dinamakan "kesetiakawan sosial" (*ashabiyyah*) di kalangan masyarakat Melayu-Muslim dan memperkokoh loyalitas mereka dalam menghadapi kekuasaan negara yang semakin besar.

Periode 1973-1982

Jatuhnya pemerintahan militer tahun 1973 dan ditegakkannya demokrasi yang berlangsung selama tiga tahun, seolah-olah mendatangkan suatu era baru dalam politik Thailand. Setiap lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam urusan negara. Akan tetapi, seperti yang dikemukakan oleh Arong Suthasat yang dikutip oleh Surin Pitsuwan bahwa "akar konflik yang terjadi di keempat propinsi (Melayu-Muslim) itu adalah perbedaan kebudayaan dan rasa benci (antara yang memerintah dan yang diperintah)". Dengan demikian, setiap

perubahan dalam kepemimpinan tentunya akan menimbulkan perubahan dalam taktik dan bahkan dalam ideologi perjuangan komunitas Melayu-Muslim untuk memperoleh hak menentukan nasib sendiri. Berbagai imbauan dan protes dalam periode ini, lebih didasarkan atas asas-asas yang diserukan oleh pemerintah Thailand sendiri seperti kebebasan, persamaan, dan jaminan hak-hak politik bagi semua warga negara Thailand tanpa memandang asal-usul ras.

Perubahan paling penting yang terjadi pada golongan Melayu-Muslim di Thailand adalah terbentuknya berbagai kelompok militan yang secara terang-terangan bertujuan membebaskan daerah Melayu dari kekuasaan Thai, seperti Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP), Barisan Revolusi Nasional (BRN), dan *Pertubohan Persatuan Pembebasan Pattani (PPPP)* atau *Pattani United Liberation Organization (PULO)* yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik perjuangan yang berbeda-beda meskipun mempunyai tujuan yang sama, yaitu membebaskan daerah Melayu-Muslim dari kekuasaan pemerintah Thailand.

Kecemasan mengenai kehancuran Islam dan identitas Melayu sebagai akibat proses asimilasi melalui kebijakan integrasi nasional oleh pemerintah Thailand itu telah mendorong banyak orang untuk menggunakan cara-cara kekerasan untuk melawan. Munculnya berbagai kelompok gerakan separatis semakin meningkatkan intensitas kekerasan secara nyata. Selain itu, faktor ideologis telah menambah eskalasi konflik di Thailand Selatan ketika yang diserukan bukan hanya Islam saja, melainkan sosialisme Islam yang hendak ditegakkan dengan cara kekerasan. Kebangkitan fundamentalisme Islam juga

semakin mempengaruhi gelombang kekerasan di mana seruan untuk menjalankan dengan ketat ajaran-ajaran Islam guna meningkatkan kesadaran beragama dan mempererat identitas etnik masyarakat Melayu-Muslim dalam periode ini.

Pada tahun 1975-1976, demonstrasi besar menjadi peristiwa penting dalam membantu kesadaran politik di kalangan massa rakyat Melayu-Muslim. Demonstrasi yang dimulai pada tanggal 11 Desember 1975 sampai dengan 24 Januari 1976 kian membuktikan kemahiran PULO dalam soal politik dan taktik. Antara tahun 1977 sampai tahun 1982, bentuk kekerasan paling umum terjadi adalah taktik pemerasan atau uang perlindungan, penutupan perkebunan karet, dan penculikan serta pembunuhan. di empat wilayah Thailand Selatan. Kampanye teror ini sepertinya memiliki tujuan lain selain uang, yaitu perasaan tidak aman dan tidak adanya perlindungan dari pihak pemerintah setidaknya akan membuat orang-orang Thai-Buddhis keluar dari daerah konflik tersebut.

Tindakan perlawanan lain yang dilakukan oleh kelompok separatis adalah aksi-aksi penyerangan dan sabotase terhadap fasilitas-fasilitas infrastruktur milik pemerintah, seperti penyerangan pada para pejabat pemerintah, pusat-pusat komunikasi internasional, fungsi-fungsi raja, perusakan dan pembakaran gedung sekolah, penembakan terhadap guru sekolah, pemboman jembatan dan gedung-gedung pemerintah serta kantor polisi. Adapun tujuan dari aksi-aksi adalah menghalangi upaya pemerintah untuk melaksanakan kebijakan integrasi nasional di daerah Pattani Raya. Sedangkan tujuan utamanya adalah internasionalisasi isu Pattani Raya di Thailand Selatan melalui media-media internasional sebagai

akibat tindakan balasan dari pihak pemerintah yang dilakukan melalui operasi-operasi militer yang represif untuk meredam gejolak kekerasan yang sedang berlangsung, seperti : pemboman di Bandar Udara Internasional Don Muang, Bangkok, pada tanggal 4 Juni 1977, serangan bom pada saat raja sedang mengunjungi propinsi Yala pada 22 September 1977, dan pemboman stasiun kereta api Had Yai (yang menghubungkan Thailand Selatan dengan Malaysia dan Singapura) pada 8 Februari 1980. Ketiga kasus di atas telah berhasil menarik perhatian luas di dunia internasional.

Periode 1995-2007

Berakhirnya perang antara Uni Soviet dan Afghanistan juga telah mempunyai suatu dampak tidak langsung atas upaya pemisahan diri di Thailand Selatan. Munculnya gerakan-gerakan separatisme baru yang dibentuk oleh para mantan veteran-veteran perang tersebut untuk kembali memperjuangkan cita-cita pendirian negara merdeka di bekas daerah kerajaan Pattani Raya. Pada tahun 1995, berdiri Gerakan Mujahideen Islam Pattani (GMIP) yang dibentuk oleh Nasori Saesaeng, seorang veteran perang Afghanistan. Tujuan dari gerakan ini sama seperti halnya PULO, yaitu untuk menciptakan sebuah negara Islam di Thailand selatan. Namun, GMIP juga mendukung Osama bin Laden yang di cap sebagai pimpinan jaringan terorisme Al-Qaeda dan memiliki hubungan dengan kelompok jaringan Jamaah Islamiyah. Selain itu, muncul juga organisasi perlawanan Bersatu walaupun tujuan dan arah perjuangan mereka masih dianggap belum jelas.

Di tahun 1995, terjadi perpecahan di antara para pemimpin inti PULO sehingga memunculkan pergerakan baru yaitu *New PULO* atau PULO 88 atau Abu Jihad PULO yang dipimpin oleh Dr. A-Rong Muleng sementara Haji Habeng Abdul Rohman memimpin PULO dengan sayap militernya " Caddan Angkatan Perang." Dalam pada itu, kaum tua PULO di bawah kepemimpinan Tuanku Biyo kodoniyo masih mempertahankan keadaan tetap dan tujuan awal PULO hingga tiba saat yang tepat. Setelah beberapa para pemimpin kaum tua dan *New PULO* ditangkap di awal tahun 1998, dengan seketika kebimbangan terjadi di dalam organisasi ini. Sebagai hasilnya, membuat moral sebagian anggotanya menjadi begitu rendah karena kehilangan pemimpinnya. Banyak anggota kelompok perlawanan ini yang menyerahkan diri mereka kepada pemerintah Thailand walau apa yang dilakukan kedua fraksi itu tidak sebesar perlawanan sebelumnya.

Gerakan perlawanan dari kelompok separatis yang sempat padam selama beberapa tahun, pada tahun awal Januari 2004 muncul kembali dengan adanya penyerbuan terhadap markas militer Distrik Arion di Narathiwat yang menewaskan empat tentara Thailand dan hilangnya 300 senapan lengkap beserta amunisinya. Sejak peristiwa itu hingga pertengahan tahun 2007, aksi-aksi kekerasan masih terus berlangsung sampai sekarang.

BAB IV

ANALISA HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaruh Gerakan Separatis Pattani Terhadap Aspek Keamanan

Di Thailand

Letak Thailand selatan sangat strategis dari sisi geopolitik. Berbatasan dengan Malaysia dan di mulut Selat Malaka. Dari perairan Thailand selatan dapat dimonitor kapal-kapal yang berlayar dari Laut China Selatan menuju Selat Malaka. Di wilayah perbatasan Thailand selatan sendiri tercatat pernah tiga kali terjadi pemberontakan bersenjata, yakni Partai Komunis Malaya, Partai Komunis Thailand, dan beragam faksi perlawanan Pattani. Hal ini terjadi sejak pemerintahan Thailand memasukkan daerah Pattani Raya ke dalam negara Thai pada tahun 1902, telah berulang kali terjadi protes dan pemberontakan melawan kekuasaan pemerintah Thailand.

Sejak melakukan aksinya menentang pemerintah Thailand, kehadiran gerakan separatis Islam di Thailand Selatan telah menyebabkan konflik yang berkepanjangan dengan aparat militer di Thailand. Masyarakat hidup dalam ketakutan, aktivitas sehari-hari mereka terganggu akibat adanya konflik tersebut. Aksi-aksi kekerasan seperti teror, pembunuhan, penculikan, dan peledakan bom terus-menerus mewarnai suasana di empat propinsi di Thailand Selatan termasuk propinsi Songkla telah mengakibatkan puluhan ribu korban jiwa yang tewas.

Pada awal pemerintahan Thailand yang dikuasai oleh tentara: Jenderal Luang Pibulsongkram, yang memimpin 1938-1944, Marshal Sarit Thanarat, 1958-1963 dan pemimpin jenderal lainnya, kebijakan nasionalisme budaya Thailand menjadi kebijakan utama. Thaisasi upaya penggunaan budaya dan bahasa Thai secara kuat di seluruh Thailand, termasuk wilayah Selatan, membuat benturan budaya yang keras, yang menimbulkan resistensi sangat kuat bagi Muslim Melayu di Thailand Selatan.

Dalam kasus separatis di Thailand Selatan, lebih dari 2000 orang meninggal. Korban lebih banyak ditembak dan dibom oleh kelompok tidak dikenal, juga oleh pendekatan militer dan polisi terhadap muslim. Pada April 2004, 30 pemuda Muslim ditembak oleh tentara di masjid Kru se. Masjid ini sangat bersejarah karena didirikan pada abad ke 15, masjid tertua di Thailand. Satu periode dengan masa kejayaan Islam pada Khalifah Abbasiyah. Peristiwa kedua adalah pada Oktober 2004, sekitar 175 Muslim Tak bai meninggal diperjalanan, setelah mereka demonstrasi kepada pemerintah dan dimasukkan dalam truk dalam kondisi terikat tangan dibelakang. Hal ini mendapat kecaman dari negara- negara tetanga khususnya Indonesia dan Malaysia.

Tragedi Tak Bai empat tahun lalu merupakan kebangkitan kesadaran rakyat keturunan Melayu di Thailand Selatan atas penindasan yang dialami mereka selama ini. Warga Thailand Selatan melakukan aksi balas dendam dengan bom, serangan sporadis, bahkan pembunuhan pejabat. Sistem gerilya diterapkan, yang menargetkan korban tentara, polisi, pegawai pemerintah Thai,

etnis China dan pendeta Buddha. Aparat keamanan Thailand mencatat ada 2.633 serangan terhadap personel militer di kawasan selatan sepanjang tahun lalu. Angka itu meningkat dari jumlah serangan tahun sebelumnya yang hanya 1.324. Untuk meredam serangan, aparat keamanan Thailand sudah menahan 3.000 orang. Kerusuhan ini sempat menjadi perhatian Amerika Serikat yang menawarkan bantuan keamanan untuk mengatasi 'gerilyawan' dari Selatan.

Kekerasan tidak kunjung berhenti di Selatan. Akibat dari kecurigaan pemerintah, pada tanggal 29 April 2007, 24 Muslim ditahan di Pattani. Mereka dicurigai mendukung aktivitas separatis. Tidak lama kemudian, pada tanggal 8 Mei 2007, 100 perempuan dan anak-anak Muslim menutup jalan Yaha-Patae di Yala yang menuntut ditangkapnya tentara yang membunuh masyarakat Muslim. Karena tertutupnya jalan ini, jalan menuju distrik Bannang Satta, Than To dan Betong untuk sementara ditutup. Muslim juga terus menutup jalan Yala-Betong menuju kamp tentara di Pattani selama lebih dari tiga hari, untuk menuntut dilepaskannya 24 Muslim yang tangkap di Pattani. Pada tanggal 8 Mei 2007, 300 massa Buddhis protes di Tambon Tham Talu, distrik Bannang Sata menuntut agar Muslim segera menghentikan gerakan demonstrasinya. Pada hari yang sama, di distrik Muang, Yala lebih dari 10 toko, *show room* mobil, toko emas dan bank swasta menerima ancaman bom. Pembunuhan dan ancaman bom tidak berhenti.

Beberapa minggu kemudian, selama dua hari kekerasan terus menghantui di Narathiwat, Yala dan Pattani. Pada Sabtu, 19 Mei 2007, seorang tukang

bengkel beragama Buddha dan seorang Muslim terbunuh di Yala. Sehari kemudian pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2007, dua orang dewasa, seorang remaja belasan tahun terbunuh, dan sebelas lainnya luka-luka akibat ledakan bom di Pattani. Beberapa jam kemudian, dua bom meledak di pasar Narathiwat, yang melukai tujuh polisi, beberapa tentara dan masyarakat. Teror ini semakin mencekam masyarakat. Mereka tidak tahu siapa pelaku dan bagaimana korban. Karena, banyak juga Muslim jadi target penembakan misterius. Dua hari sebelumnya, Jum'at, 18 Mei 2007, Sulaiman Abdulganee (42) seorang warga negara Indonesia, ditangkap di Yala. Sulaiman menikah dengan perempuan Muslim Thailand. Dia ditangkap karena memiliki senjata secara ilegal, dan mendapat tuduhan menyelundupkan obat-obatan terlarang.

Penduduk hidup dalam cengkeraman ketakutan, kendati kehidupan sepintas berjalan normal. Pelajar tetap pergi ke sekolah, pedagang berjualan ke pasar, pegawai bekerja di kantor, dan jamaah salat tetap pergi ke masjid. Namun, itu hanya tampak di permukaan. Setelah Maghrib, kondisi berubah drastis. Jalanan menjadi makin lengang, kedai menjadi semakin sepi. Minoritas Tiongkok dan Buddhist yang siang masih tampak menjaga toko mereka tak terlihat lagi

International Crisis Group (2005, 2007) menyebut bahwa gerakan kekerasan ini murni *insurgency*, gerakan yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah, dan upaya untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat, setidaknya

keinginan otonomi khusus atau diperluas agar segera dilaksanakan, dengan memberi kesempatan kerja, pendidikan dan lainnya bagi Muslim Melayu.

Pergolakan bersenjata dan aksi kekerasan di kawasan selatan semakin merepotkan Pemerintah Thailand, pendekatan keamanan dan politik itu diperkuat dengan langkah diplomatik. Menteri Luar Negeri Thailand Surakiart Sathirathai mengunjungi Malaysia untuk membahas persoalan pemberontakan di kawasan selatan, yang memang berbatasan langsung dengan Malaysia. Apalagi selama ini disinyalir pemberontak sering mondar-mandir antara wilayah perbatasan Thailand dan Malaysia. Tidak sedikit penduduk di tiga provinsi di kawasan Thailand selatan memiliki kewarganegaraan ganda Thailand-Malaysia.

Kaum pemberontak tidak jarang menyeberang ke wilayah perbatasan Malaysia jika dikejar petugas keamanan Thailand. Dalam semangat solidaritas ASEAN, Malaysia menyatakan sikap kooperatif dalam mengendalikan keadaan di wilayah perbatasan dengan Thailand. Gelombang kekerasan bersenjata selama berapa hari terakhir memperlihatkan gerakan pemberontakan di kawasan selatan belumlah surut. Gerakan itu tampaknya hanya mengalami pasang surut. Akar persoalannya tidak pernah dicabut sehingga tetap sebagai duri dalam daging.

Pengaruh pergolakan itu tidaklah kecil bagi kepentingan Thailand. Secara psikologis tentu saja mengusik perhatian seluruh bangsa Thailand. Dapat dipastikan pula pergolakan di wilayah selatan mengganggu proses pembangunan Thailand secara keseluruhan.

PM Thaksin tidak mampu memperlihatkan keemasannya atas pergolakan berdarah yang berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi, merusak citra Thailand sebagai tempat aman bagi turis dan investasi. Kekecewaan Thaksin dilampiaskan antara lain dengan menyatakan aparat keamanan, militer, dan dinas intelijen gagal mengantisipasi gangguan dan aksi kekerasan seperti telah terjadi dan memakan banyak korban jiwa.

Kasus Thailand Selatan makin kusut, terutama tatkala militer menggunakan "tangan besi"-nya. Militer Thailand kembali menangkap kaum Muslim tanpa dakwaan. 160 orang warga Muslim, termasuk enam orang wanita, ditahan tanpa dikenai dakwaan dalam serangkaian razia di kawasan selatan. Para tahanan itu kabarnya dibawa untuk diinterogasi di sebuah kamp Angkatan Darat di Pattani. Berdasarkan undang-undang darurat mereka ini dapat ditahan tanpa dikenai dakwaan selama 28 hari. Menurut Kolonel Aca Tiprach, para tahanan itu akan dibebaskan jika terbukti tidak terlibat dalam pemberontakan di Thailand Selatan, tapi sampel DNA mereka akan disimpan sebagai rekor.

Isu Thailand Selatan terus menjadi keprihatinan negara-negara di kawasan selatan. Hingga hari ini, ribuan jiwa terenggang akibat kekerasan bersenjata di provinsi Yala, Pattani, Narathiwat dan sejumlah daerah lain di selatan Thailand, yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Konflik tersebut semakin parah, dimasa pemerintahan Thaksin Shinawatra yang menggunakan cara-cara represif untuk mengendalikan kekerasan. Ketika

Surayud untuk memulihkan kepercayaan warga Muslim pada pemerintah adalah permintaan maaf yang disampaikan langsung oleh pemerintah pada warga Muslim atas penindasan yang dilakukan selama bertahun-tahun.

Konflik separatisme di Thailand Selatan sendiri paling tidak sudah berlangsung hampir satu abad sejak pemberontakan separatis Muslim di Yala dan Narathiwat tahun 1910-1911. Kekerasan demi kekerasan terus terjadi di Thailand Selatan dan selalu menjadi ganjalan setiap pemerintahan yang berkuasa. Ganjalan itu juga menimpa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin, seorang pensiunan kolonel polisi dan belakangan menjadi pengusaha.

Michael Gilquin dalam bukunya *The Muslims of Thailand* menyebutkan sejak terjadinya perampokan dan penyerangan gudang persenjataan militer di wilayah Thailand Selatan pada 4 Januari 2004, konflik separatisme berdarah terus memanas. Peristiwa itu sendiri menewaskan empat tentara dan lebih dari 300 persenjataan berbahaya dibawa kabur. Kejadian ini terang membuka kembali konflik pemerintah dengan kelompok separatis di Thailand Selatan. Setelah peristiwa itu Thaksin menetapkan propinsi perbatasan selatan sebagai daerah darurat perang (*martial law*) dan karena itu menambah kekuatan militer. Namun hari-hari setelah pemberlakuan darurat perang itu korban terus berjatuhan silih berganti dari kedua belah pihak.

Pemberlakuan darurat perang itu bukannya mengurangi polemik, justru menjadikan wilayah selatan ke dalam siklus kebiadaban dan saling bunuh hampir

setiap hari dengan korban dari pihak tentara, polisi, pegawai pemerintah, kelompok muslim separatis dan juga para biksu Buddhis. Hal lain yang menambah kerumitan adalah pada 12 Maret 2004 seorang pengacara muslim terkemuka, Somchai Neelapaijit diculik dan tidak diketahui rimbanya hingga sekarang. Somchai merupakan pengacara yang gigih membela para tahanan yang diduga anggota Jamaah Islamiyah. Suasana saling bunuh, *zero sum game* hingga hari ini masih terus terjadi di Thailand Selatan. Kekerasan di bagian selatan terus terjadi dan kini kekerasan sudah merambah Ibu Kota Bangkok. Tidak mustahil, ledakan bom malam tahun baru itu adalah awal dari tragedi besar yang akan menggoncang pemerintahan bentukan militer.

Kebijakan represif yang digelontorkan pemerintah terhadap kelompok separatis di Thailand Selatan, lama kelamaan melahirkan perasaan traumatik tersendiri di kalangan umat Islam yang tinggal di daerah konflik. Sekalipun penganut Islam kini gampang ditemui di Bangkok karena terdapat setengah juta penganut Islam di sana dan juga muslim keturunan China di Chiang Mai, kota terbesar di Thailand utara, namun bukan berarti integrasi mereka terhadap nasionalisme Thailand dalam tataran yang sepadan. Kaum muslim di Bangkok dan di Chiang Mai berbeda persepsi tentang integrasi terhadap bangsa Thailand dengan kaum muslim di Selatan. Kaum muslim Selatan didorong intensi kultural mereka yang kental, menuntut hak-hak kultural mereka seperti pemakaian

Bahasa Melayu (Yawi) diakui pemerintah. Tuntutan demikian ini jarang terdengar dari kalangan muslim di luar wilayah konflik di Selatan.

Instabilitas politik yang berlangsung sepanjang tahun 2006 lalu memungkinkan tumbuhnya gerakan separatisme lain dalam bentuk teror. Demokrasi dalam pengertian mengedepankan proses pemilihan umum sulit bertahan di Thailand, karena sistem monarki lebih menancap kuat. Di sisi lain, monarki dipandang sebatas simbol belaka. Karena itu, dilihat dari segi organisasi, disiplin, sentral komando dan monopoli senjata, militer Thailand menjadi institusi yang sangat *powerfull* sekarang ini, bahkan melebihi pemerintah itu sendiri.

Di tengah kontrol militer berlebihan itu, berbagai spekulasi mungkin saja bermunculan tentang siapa pelaku bom malam tahun baru lalu. Bukan tidak mustahil, peristiwa itu juga melibatkan konflik identitas, sebuah pertarungan identitas antara kultur muslim yang mengancam kultur Buddhis, di samping kemungkinan keterlibatan kelompok antikudeta maupun separatis muslim Selatan.

Dr. Christoph Marcinkowski, ahli kajian Islam dan Asia Tenggara, yang saat ini menjadi dosen tamu di *Institute of Defense and Strategic Studies* IDSS Singapura, mengatakan, konflik Thailand Selatan, bukan semata-mata persoalan agama, meski hal tersebut yang kelihatan di permukaan. Muslim di Thailand

Selatan yang merupakan minoritas di Thailand, menurut Dr Marcinkowski sebenarnya hidup damai berdampingan sejak agama Islam masuk ke Thailand

Pergolakan di kawasan selatan memang terasa sebagai cobaan berat bagi Thailand di tengah upaya pembangunan ekonomi. Pemerintah dan masyarakat Thailand pun ditantang bagaimana menyelesaikan persoalan itu secara tepat sehingga tidak sampai menimbulkan gejolak yang lebih luas.

Kasus pemberontakan separatis seperti dihadapi Thailand senantiasa menimbulkan sikap mendua bagi banyak orang, lebih-lebih saat ini. Ada yang berpandangan, setiap suku bangsa memiliki hak memperjuangkan kepentingannya, termasuk mendirikan negara sendiri. Namun, tidak sedikit pula yang berpendapat, tuntutan separatisme mempunyai taruhan besar bagi integritas dan eksistensi negara-bangsa Thailand. Tuntutan pemisahan itu sendiri, apalagi melalui cara kekerasan, sudah menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda.

Sudah berkali-kali terbukti dalam sejarah, proses disintegrasi hanya menimbulkan pergolakan dan guncangan hebat. Sekadar contoh, dampak proses perpecahan Uni Soviet atau Yugoslavia sampai sekarang belum tuntas. Pertikaian masih berlangsung di beberapa negara pecahan Uni Soviet atau Yugoslavia. Sering terjadi, gerakan perpecahan yang didorong atas dasar emosi dan sentimen perbedaan akan berentetan panjang. Sebab, perbedaan yang menjadi salah satu corak kehidupan manusia akan terus dieksploitasi. Faktor perbedaan secara

alamiah selalu hadir, bahkan di antara saudara sekandung. Pertikaian atas dasar perbedaan mudah sekali muncul.

Jelaslah, pemisahan dan perpecahan bukanlah jalan keluar yang terbaik. Gerakan perpecahan sering kali pula karena kegagalan mengelola perbedaan. Persatuan dan kesatuan sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola perbedaan. Tidak dapat dimungkiri pula eksploitasi terhadap perbedaan tidak jarang sebagai pelarian atas kekecewaan. Masyarakat di kawasan Thailand selatan merasa kecewa karena kurang diperhatikan dalam proses pembangunan selama ini. Dengan demikian, penyelesaian atas krisis itu bukanlah dengan pendekatan kekerasan dan penggunaan kekuatan militer, tetapi dengan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.

B. Kebijakan Pemerintahan Thailand Dalam Upaya Menciptakan

Keamanan Di Thailand

1. Dari Segi Internal

Komisi Rekonsiliasi Nasional (NRC, *National Reconciliation Commission*) dibentuk oleh pemerintah Thailand ditujukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sekitar satu abad. Beberapa rekomendasi hasil kerja komisi sangat positif untuk perdamaian di Selatan. Diantaranya, diperbolehkan penggunaan bahasa Melayu dilembaga pendidikan pemerintah dan perkantoran. Komisi juga meminta berbagai peristiwa penghilangan warga dan penembakan baik dilakukan oleh warga maupun tentara kepada warga diusut tuntas dan transparan. Rekomendasi ini telah disampaikan lebih dari satu tahun,

tepi pemerintah belum juga melaksanakan butir-butir rekomendasi secara menyeluruh.

Komisi Rekonsiliasi Nasional (NRC) merekomendasikan banyak hal, antara lain otonomi khusus dan pemberian kebebasan lebih atas penggunaan bahasa Melayu di wilayah publik. Tetapi rekomendasi ini hingga kini tidak mendapatkan sambutan cepat dari pemerintah. Perdana Menteri Chulanont membuka wacana ambisi bagi anggota gerakan separatis Thailand Selatan. Tetapi wacana ambisi ini ditanggapi secara dingin oleh masyarakat Muslim di Selatan karena pemerintah tidak melindungi secara sepenuhnya gagasan, ide dan pandangan masyarakat bagaimana mereka menempuh masa depan dibawah pemerintah Thailand.

Saat ini *National Reconciliation Commission* (NRC, Komisi Rekonsiliasi Nasional) Thailand merekomendasikan diperbolehkannya bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan, perkantoran dan media di wilayah Thailand Selatan, karena bahasa Melayu sebagai bagian dari identitas lokal yang penting dihormati oleh pemerintah pusat Thailand.

Upaya rekonsiliasi telah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam lima tahun terakhir, dengan terbentuknya Komisi Rekonsiliasi Nasional yang mengantarkan dan memfasilitasi perdamaian di Thailand, membuat banyak rekomendasi Pendidikan, rekayasa bahasa Melayu. Pemerintah menanti dan mengikuti buah Melayu. X. ...

... Kuantitas peran tentara di ...
... Kuantitas peran tentara di ...
... tidak bisa dipandang ...
... tidak bisa dipandang ...
... tetapi saja tidak ...
... saja tidak ...
... n ketan ...
... bahasa nasional

Thai dan sikap yang mencerminkan nasionalisme pro kebijakan pusat menjadi penghambat rekonsiliasi yang telah dilakukan baik oleh lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan komisi rekonsiliasi. Kehadiran masyarakat internasional, antara lain Nahdlatul Ulama yang menjembatani ulama di Thailand Selatan dan pemerintah kerajaan Thailand akan banyak membuahkan hasil jika pemerintah pusat mengakomodasi gagasan dan harapan Muslim Melayu di Selatan, yaitu penggunaan tradisi Muslim Melayu lebih terbuka, dan pengakuan.

Meskipun tidak memiliki peran untuk mengontrol anggota PULO yang masih aktif, generasi tua PULO di Eropa menawarkan upaya negosiasi dengan pemerintah Thailand. Pada Juli 2002, Thaksin memerintah keponakannya Jenderal Chaisit Shinawatra untuk bernegosiasi dengan elemen PULO dan BRN. Ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini masih mempertahankan kekuatannya. Meskipun para komandan-komandan ini telah ditangkap atau terbunuh, sisa gerilyawan masih melakukan aksi-aksi kekerasan.

Secara prinsip pada tahun 2004, hampir seluruh faksi yang memberontak menandatangani perjanjian rekonsiliasi: 'Joint Peace and Development Plan for South Thailand' (Perjanjian Bersama dan Rencana Pembangunan Thailand Selatan). Di antara mereka adalah PULO, Barisan Rakyat Nasional (BRN-C), Bersatu, Gerakan Mujahid Islam Pattani (MIP), dan Barisan Pembebasan Islam Pattani. Tetapi ketika mereka kembali ke Malaysia, beberapa anggota masih melakukan aksi-aksi kekerasan. Jumlah Muslim

...delakung oleh UMM independen di Thailand.
...upaya perdamaian
...melakukan upaya rehabilitasi
...negara yang mengalami ombak
regani dan konflik. Disamping, Majelis Ulama, tokoh pesantren dan mahasiswa
secara prinsip mendukung upaya rekonsiliasi dan perdamaian. Keinginan kuat
mereka tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintah atas keamanan, dan
lemahnya dukungan atas kemajuan pendidikan secara luas, dan kesempatan kerja
di Selatan.

Damai tetapi tegang. Kalimat itulah yang agaknya dapat menggambarkan situasi dan kondisi lapangan beberapa waktu belakangan ini di Thailand wilayah selatan pascakonflik yang meredak sejak Januari 2004 dan menewaskan lebih 500 orang. Perdana Menteri (PM) Thailand, Thaksin Shinawatra, berulang-ulang harus turun tangan langsung ke selatan melihat keadaan. Wilayah yang sedang dilanda konflik tersebut berjarak sekira 1.200 hingga 1.400 kilometer di selatan Bangkok.

Kantor polisi atau pos pemeriksaan dan markas militer setempat terlihat menerapkan siaga satu. Bahkan, kompleks markas besar Marinir dan Angkatan Laut Kerajaan Thailand yang terletak lebih ke utara, Songkhla (sekira 950 kilometer dari Bangkok) tampak terus dijaga oleh anggota-anggotanya yang berseragam tempur lengkap dengan senjata siap tembak. Mereka mengenakan ban merah melingkar di lengan kanan, yang menunjukkan komando siaga penuh.

Kantor-kantor polisi atau pos militer diberi perlindungan di sekitarnya. Semakin mendekati wilayah Tak Bai, semakin kerap melintas patroli-patroli tentara dengan kendaraan militer. kembali gerakan separatis di Thailand selatan yang pernah terjadi, namun mereda pada 1970 an.

Kemunduran di bidang keamanan di Thailand selatan itu membuat pihak Bangkok memperketat pengamanan, antara lain mengirimkan tentara-tentara elitnya, termasuk satuan Marinir, dan unit-unit pasukan yang baru saja pulang dari penugasan ke Irak. Untuk operasi pemulihan keamanan di wilayah selatan itu.

2. Dari Segi Eksternal

a. Pemerintah Thailand meminta bantuan Indonesia dalam upaya menciptakan keamanan di Thailand.

Perdana Menteri Surayud Chuanont mencoba melakukan rekonsiliasi model integrasi GAM-Aceh. Setelah integrasi GAM kepada Bangsa Indonesia pasca tragedy tsunami, model integrasi ini menjadi wacana dikalangan intelektual dan pemerintahan Thailand. Langkah-langkah menuju model ini telah dilakukan sebagai pengundang pemerintah Aceh. AAD (Nagorno-Aran) dan pemerintah Thailand dan pemerintah Indonesia.

Salah satu di basis yang akan dilaksanakan, akan dilaksanakan melalui pendekatan yang akan dilakukan oleh pemerintah Thailand dan pemerintah Indonesia.

'peristiwa kunci' di Thailand Selatan sebagaimana 'musibah tsunami' di Aceh membuat langkah re-integrasi provinsi Muslim di Selatan berjalan lambat. Juga, tiadanya figur kelompok atau gerakan yang kuat di Selatan, sebagaimana 'GAM' di Aceh, membuat hilangnya keseimbangan negosiasi dan rekonsiliasi. Siapa yang mewakili Muslim di Thailand Selatan.

Bagaimana pemerintah pusat Thailand berunding dengan 'gerakan separatis' Selatan. Tentu saja hambatan-hambatan ini mestinya menantang pihak Muslim di Selatan dan pemerintah Thailand untuk memodifikasi kesepakatan damai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Thailand Selatan.

Warga Thailand Selatan adalah minoritas dalam aspek agama dan etnis, sementara GAM adalah Muslim sebagaimana mayoritas Muslim di Indonesia. Masalah etnisitas juga tidak terlalu besar. Hanya kebijakan represif Orde Baru membuat GAM semakin menguat untuk menuntut kemerdekaan Aceh. Nah, konflik di Thailand Selatan lebih kompleks dalam aspek agama, etnisitas dan politik, yang berlangsung sejak kerajaan Siam 1906 hingga rejim militer pasca Thaksin, 2007. Seratus satu tahun adalah waktu yang sangat lama, yang menuntut kedua belah pihak untuk saling mengalah demi kepentingan perdamaian, kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Thailand Selatan.

Kerjasama yang telah dibangun selama ini melibatkan pemerintah LSM dan ulama dari Malaysia dan Indonesia sangat baik untuk pertumbuhan tingkat dan Muslim Selatan yang secara kultural meningkatkan peran dan partisipasi

pemerintah, dan kerjasama regional, maka resolusi yang diupayakan selama ini akan memupuk perdamaian, stabilitas dan kemakmuran wilayah Selatan ini, yang selama beberapa dekade jauh tertinggal dibandingkan wilayah pusat Thailand.

2. Keterlibatan Malaysia dalam upaya menciptakan keamanan di Thailand

Kekerasan di beberapa provinsi bagian selatan Thailand, nampaknya belum berhenti. Penyerangan terjadi hampir setiap hari dan jumlah korban yang tewas semakin meningkat. Namun harapan baru untuk menghentikan konflik ini muncul ketika Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Badawi berkunjung ke Thailand. Kedua negara sepakat untuk mempererat kerjasama mereka. Bahkan sejumlah proyek telah diumumkan pada kunjungan Badawi.

Pemerintah Thailand meminta bantuan Malaysia untuk mengatasi peningkatan kekerasan di wilayah Thailand Selatan yang diwujudkan dalam pertemuan dengan pertemuan Perdana Menteri Abdullah Baddawi yang bertujuan membahas upaya Penghentian tindak kekerasan dan melakukan kerjasama dalam penangan ant berkeban ganda Thailand Malaysia.

Melalui kerjasama Thailand mayoritas Islam, diangan Menteri Badawi kunjungan ini bekas Perdana Menteri merontak, mengganggu

Perdamaian, keamanan dan stabilitas di provinsi bagian selatan Thailand sangat penting bagi beberapa negara bagian di Malaysia. Malaysia menyambut baik pendekatan perdamaian pemerintah Thailand untuk rekonsiliasi dengan provinsi-provinsi di bagian selatan negara itu."Dan Malaysia berjanji akan lebih sering bekerjasama dengan Thailand.

Malaysia sangat prihatin dengan isu Thailand Selatan. Malaysia ingin bekerjasama dengan cara apa saja supaya bisa membantu mengurangi tingkat kekerasan di Thailand Selatan yang ancaman stabilitas wilayah itu. Kedua pemimpin tersebut menyepakati berbagai inisiatif yang akan dibahas dalam beberapa bulan mendatang. Abdullah mengatakan, negaranya siap menjadi mediator dalam negoisai antara pemerintah Thailand dan kelompok seperatis. Ia juga berjanji akan memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah Islam di Thailand. Malaysia sangat mendukung pendidikan Islam moderat.

Warga Thailand Selatan memiliki persamaan etnis dan agama dengan Malaysia. Jadi pelajaran Islam yang kami tawarkan dapat memenuhi kebutuhan keagamaan mereka. Tapi warga non-Islam tidak perlu khawatir atau merasa takut dengan pelajaran tersebut. Langkah ini disambut baik oleh kelompok-kelompok hak azasi manusia dan bekas pemimpin kelompok pemberontak yang kini tinggal di pengasingan.

Anwar Ibrahim, bekas Wakil Perdana Menteri Malaysia yakin, Badawi bisa lebih banyak membantu untuk menghentikan kekerasan yang terus terjadi. Orang-orang Islam dan Malaysia berperan punya untuk menciptakan perdamaian, mengatasi inti masalah pemberontakan, dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Kami harus mendukung dan mendorong teman-teman kami di bagian Bangkok dan bagian selatan Thailand supaya mereka bisa melakukan perubahan. Kerjasama yang diperbaharui antara kedua negara tetangga ini adalah langkah yang penting. Namun para analis mengatakan, warga lokal Islam tetap takut bekerjasama dengan pihak berwenang. Mereka khawatir akan menjadi target kelompok-kelompok separatis.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegagalan pemerintah Thailand dalam mengakomodasi seluruh kebutuhan dasar rakyatnya telah mengecewakan sebagian pihak, khususnya kaum Melayu-Muslim, yang akhirnya memicu timbulnya konflik gerakan separatis Pattani dengan pemerintah Thailand. Kehadiran gerakan separatis Pattani di Thailand Selatan telah menyebabkan konflik yang berkepanjangan dengan aparat militer di Thailand. Masyarakat hidup dalam ketakutan, aktivitas sehari-hari mereka terganggu akibat adanya konflik tersebut. Aksi-aksi kekerasan seperti teror, pembunuhan, penculikan, dan peledakan bom terus-menerus mewarnai di empat propinsi di Thailand Selatan terutama di Propinsi Pattani yang telah mengakibatkan puluhan ribu korban jiwa yang tewas.
2. Dalam mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Thailand telah melakukan berbagai kebijakan dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian di Thailand Selatan baik dari segi **internal**, namun menemui berbagai kegagalan hal ini disebabkan karena, pemerintah tidak melibatkan secara sepenuhnya gagasan, ide dan pandangan masyarakat Thailand Selatan, dari segi **eksternal**, Pemerintah Thailand telah

menempuh langkah yaitu meminta bantuan dari negara tetangganya yaitu Malaysia dan Indonesia sebagai pihak yang diterima dan dihormati di Thailand Selatan dan hal itu disambut baik oleh kedua negara tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dengan melihat realitas tentang pengaruh gerakan separatis pattani terhadap aspek keamanan Thailand, maka penulis membuat beberapa catatan untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam upaya menciptakan kestabilan keamanan di Thailand serta untuk melihat perdamaian di Thailand Selatan.

1. Diperlukan sikap saling percaya antara warga Thailand Selatan dengan Pemerintah Thailand dan mengurangi perasaan saling mencurigai dengan menjamin keadilan yang dipergunakan lewat hukum, sehingga tercipta keamanan di negara tersebut, karena Penyelesaian konflik di wilayah Thailand Selatan tidak cukup dengan adanya dialog. Tapi perlu adanya pembangunan masyarakat dengan yang disebut soft power. Memang, muslim di Thailand Selatan agak "terbelakang" dalam segala bidang. namun di bidang lainnya seperti ekonomi dan kesehatan belum berkembang dengan baik. Untuk itu perlu adanya peningkatan di bidang-bidang lainnya. Sehingga masyarakat di sana semakin maju pola pikir dan secara otomatis akan membawa kemajuan dalam pembangunan di wilayah Thailand Selatan. Dengan sendirinya permasalahan kecemburuan dalam pembangunan dapat diatasi.

2. Perlu ada dukungan yang jelas dari negara-negara lain utamanya ASEAN khususnya Indonesia dan Malaysia sebagai pihak yang diterima dan dihormati di Thailand selatan. dan Perlu adanya peran tokoh agama atau ormas-ormas Islam besar Indonesia yang turut membantu penyelesaian konflik Thailand selatan. "Sebaiknya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah membuka kantor perwakilan di salah satu dari tiga propinsi di Thailand selatan yang bertujuan untuk mengakomodir umat Islam di Thailand Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Azymardi Asra, 2002, *Konflik Baru Antar Peradaban Globalisasi Radialisme dan Pluralitas*, Cetakan 1, Raja Grafindo Persada
- Amal, *Ikhlalul Regiolisme, Nasionalisme, Dan Ketahanan Nasional*, 1998: Bandung
- Camara, Dom Helder 2000, *Spiral Kekerasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Chai Anand Samuda Vanija, dan Sukhumband Paribatra *Menatap Separatisme di Asia Tenggara*, 1992 Media Indonesia
- Colombis, Theodore A, And James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional ; Keadilan Dan Power*, Bandung
- Banyu, Anak Agung dan Yanyan Mochmad Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarn: Bandung
- David Melling, 2002, *Jejak Langkah Pemikiran Plato*, Yayasan Benteng Budaya: Yogyakarta
- Marpung Rusdi, 2000, *Konflik Multi Kultur*, Grafika Mardiyuana: Bogor
- May, Rudy, T. 2003, *Hubungan Internasional Kontenporer, dan Masalah-masalah Global; Isu, Konsep, Teori dan Paradigma*, Refika Aditama: Bandung
- Miall, Hugh 1999, *Resolusi Damai Konflik Kontenporer; Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, terjemahan Tri Budhi Satrio, PT. Raja Grafindo : Jakarta
- Nasution Dahlan, *Politik Internasional: Konsep dan Teori*, 1991: Remaja Karya, Jakarta
- Isaac, Harold R., *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis: Identitas Kelompok Dan Perubahan Politik*, 1993: Jakarta
- Jones, Walter S. *Logika Hubungan Internasional; Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia*, 1993
- Kche Man W, *Muslim, Separatism; The moros of Southem Philippines and The Malays of Southern Thailand*, Oxford University Press: Singapore, 1990
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2000 Rajawali Press: Jakarta
- Surbakti. Ramlan *Memahami Ilmu Politik*. 1992: Jakarta



INTERNET

Adi Saputra, Syahrial Syabrani, *Sebab-Sebab Munculnya Gerakan Separatis*,
[http://Jurnal.bc. Ac. Id/wp content/up loads/2007/08/trans%20%-20% adi 20%
April 2007. pdf](http://Jurnal.bc.Ac.Id/wp_content/up_loads/2007/08/trans%20%-20%_adi_20%_April_2007.pdf), diakses tgl 12 Februari 2008

Dwy Haryono, *Separatis Etnik Pattani di Thailand Selatan*
[http://indronet file. Wordpress com/2007/09](http://indronet.file.wordpress.com/2007/09) diakses tgl 12 Februari 2008

Separatisme, [http://www. wikipedia.org.com](http://www.wikipedia.org.com) diakses tgl 13 Februari 2008

Pengaruh Geger Thaksin Terhadap Konflik Thailand Selatan, [www. Wahidinstitute. Org/ Indonesia/content/ view/228/52/-22 k](http://www.Wahidinstitute.Org/Indonesia/content/view/228/52/-22_k), diakses tgl 12 Februari 2008

Wisata Thailand Selatan, [http://www. Wahidinstitute. Org/ Indonesia/ content/view/ 228/52/-22 k](http://www.Wahidinstitute.Org/Indonesia/content/view/228/52/-22_k)

Badrus Sholeh, *Minoritas Muslim, Konflik Dan Rekonsiliasi Di Thailand Selatan*

Eric Brahm "*Conflict Stages. " Beyond Intractability Organization*
[http:// www. Beyondintractability. Org/m/conflict stages .jsp](http://www.Beyondintractability.Org/m/conflict_stages.jsp)

Mengunjungi Pattani, Jantung Komunitas Muslim Melayu Di Thailand Sedang Bergolak
Indonesia Irib. Ir/ index. Php?option = com_content & task = view & id= 1925
diakses tgl 4 Juni 2008

Bom Meledak di Pattani, 2 Polisi Tewas,
www.sinarharapan.co.id/berita/0509/24/luu04.html - 25k - diakses tgl 4 Juni 2008

Wapedia - Wiki: Provinsi Yala wapedia.mobi/id/Provinsi_Yala diakses tgl 10 Juni 2008

BlueFame Forums: A Blue Alternative Community > Sejarah Asal Mula GAM
www.bluefame.com/lofiversion/index.php/t70580.html - 26k diakses tgl 10 Juni 2008

KoranTempo [www.korantempo.com/korantempo/2004/04/29/headline/krn,20040429,44.i
d.html](http://www.korantempo.com/korantempo/2004/04/29/headline/krn,20040429,44.id.html) - 17k diakses tgl 10 Juni 2008

Kelompok Separatis Thailand Selatan Yang Memimpin Serangan, [www.kompas. Com](http://www.kompas.Com)
diakses tgl 10 Juni 2008

Thailand dan Malaysia Sepakat Perpanjang Tembok ...

www.kapanlagi.com/h/0000158009.html - 61k diakses tgl 10 Juni 2008